

GOOD CORPORATE GOVERNANCE REPORT 2012

PT Bank ANZ Indonesia
(dahulu dikenal sebagai PT ANZ Panin Bank)



Table of Contents

I.	PENDAHULUAN.....	2
II.	TRANSPARANSI.....	3
A.	Pengungkapan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> yang meliputi 7 (tujuh) aspek cakupan <i>Good Corporate Governance</i>	3
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.....	3
2.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite.....	7
3.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal.....	10
4.	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal.....	17
5.	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar.....	29
6.	Rencana Strategik Bank.....	31
7.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya.....	33
B.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.....	35
C.	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Dewan Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.....	36
D.	Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.....	37
E.	Opsi Saham.....	38
F.	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	38
G.	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	39
H.	Jumlah Penyimpangan Internal (<i>internal fraud</i>).....	39
I.	Permasalahan Hukum.....	40
J.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	41
K.	<i>Buyback Shares</i> dan <i>Buyback</i> Obligasi Bank.....	41
L.	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.....	41
III.	AKUNTABILITAS.....	43
IV.	PERTANGGUNGJAWABAN.....	43
V.	INDEPENDENSI.....	44
VI.	KEWAJARAN.....	45
VII.	HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> BANK.....	46
VIII.	PENUTUP.....	48

I.	INTRODUCTION.....	2
II.	TRANSPARENCY.....	3
A.	Disclosure of Good Corporate Governance Implementation comprising of 7 (seven) aspects of Good Corporate Governance Principles.....	3
1.	The Implementation of Duties and Responsibility of Board of Commissioners and Board of Directors.....	3
2.	Completeness and Implementation of the Tasks of Committees.....	7
3.	The Implementation of Compliance, Internal Audit and External Audit Functions.....	10
4.	The Implementation of Risk Management including Internal Control System.....	17
5.	Lending Exposure to Related Party and Large Lending Exposure.....	29
6.	Bank's Strategic Plan.....	31
7.	The Transparency of Financial and Non-Financial Condition that have not been Defined in Other Reports.....	33
B.	Share Ownership by Members of Board of Commissioners and Board of Directors.....	35
C.	Financial and Family Relationships among Members of Board of Commissioners and Board of Directors with Other Members and/or with Controlling Shareholders.....	36
D.	Remuneration and Other Facilities Package/Policy for Board of Commissioners and Board of Directors.....	37
E.	Shares Option.....	38
F.	The Highest and Lowest Salary Ratios.....	38
G.	The Frequency of Board of Commissioners Meeting.....	39
H.	The Number of Internal Fraud.....	39
I.	Legal Issue.....	40
J.	Transaction that Contains Conflict of Interest.....	41
K.	Buy Back Shares and Buy Back Obligation of the Bank.....	41
L.	Fund Granting for Social and Political Activities during Reporting Period.....	41
III.	ACCOUNTABILITY.....	43
IV.	RESPONSIBILITY.....	43
V.	INDEPENDENCY.....	44
VI.	FAIRNESS.....	45
VII.	SELF ASSESSMENT RESULT ON THE BANK'S GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION.....	46
VIII.	CONCLUSION.....	48

Good Corporate Governance

I. Pendahuluan

PT Bank ANZ Indonesia ("Bank") memiliki aspirasi untuk menjadi salah satu bank campuran terkemuka di Indonesia dengan fokus yang kuat untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Bank menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* - GCG) yang baik, merupakan langkah awal yang sekaligus juga merupakan dasar utama dari proses transformasi untuk mewujudkan aspirasi tersebut. GCG merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa *sustainable value*. Oleh karena itu, Bank senantiasa menyempurnakan praktik-praktik bisnis yang sehat dan melaksanakan praktik perbankan yang *prudential* dalam setiap kegiatan operasional Bank.

Hal ini utamanya dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah bagi nasabah, karyawan, pemegang saham, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan Bank.

Sepanjang tahun 2012, pelaksanaan GCG telah menjadi perhatian manajemen Bank sebagai proses berkesinambungan dalam melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, yang terutama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi kinerja Bank yang pada akhirnya akan berakibat pada meningkatnya pelayanan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank, yang tidak hanya terbatas pada nasabah, melainkan juga regulator (Bank Indonesia), pemerintah, karyawan, serta pemegang saham.
- b. Meningkatkan minat dan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank.
- c. Melindungi Bank dari potensi tuntutan hukum, yang disebabkan oleh ketidaktaatan Bank terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

Bank telah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip utama dari GCG, termasuk pengelolaan Bank secara profesional berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Aktualisasi GCG dilakukan melalui sistem internal yang melibatkan Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan seluruh karyawan.

Laporan ini secara garis besar akan menyajikan upaya-upaya Bank dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip utama GCG.

I. Introduction

PT Bank ANZ Indonesia ("Bank") has aspirations to be one of the leading joint-venture banks in Indonesia with a strong focus on customers' needs.

Bank realizes that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles is an initial step and a basic start of the transformation process to achieve its aspirations. GCG is a long-term process that aims to achieve sustainable value. Accordingly, Bank continuously improves its business practices and conducts prudential banking practices in each and every Bank's operational activity.

This is mainly done in order to provide added values for customers, employees, shareholders and other stakeholders of the Bank.

During 2012, the GCG implementation had become the focus of the Bank's management as a sustainable process in continuing the efforts done in previous years, which primarily aimed to:

- a. Improve the efficiency of Bank's performance which in the end will contribute towards the services improvement given to every stakeholders of the Bank, and not only limited to customers, but also regulator (Bank Indonesia), government, employees, as well as shareholders.
- b. Enhance the level of interest and trust from all stakeholders.
- c. Protect the Bank from potential legal suits due to non-compliance with prevailing regulations.

Bank has been putting efforts to implement basic principles of GCG, including professional management of the Bank in accordance with transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness principles. Implementation of GCG is being done through internal system with the involvement of the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees.

This report sets out the Bank's efforts to implement main GCG principles.

→ Aktualisasi GCG dilakukan melalui sistem internal yang melibatkan Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan seluruh karyawan. / *Implementation of GCG is being done through internal system with the involvement of the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees.*

II. Transparansi

Aspek transparansi dalam penerapan praktik-praktik GCG didefinisikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi pelaksanaan GCG tercermin dari implementasi praktik-praktik seperti di bawah ini:

A. Pengungkapan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang Meliputi 7 (tujuh) Aspek Cakupan *Good Corporate Governance*

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, jumlah dan susunan serta komposisi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

II. Transparency

The transparency aspect in implementing GCG practices is defined as openness in delivering material and relevant information as well as openness in the decision making process. The transparency of GCG implementation is reflected from the implementation of the following practices:

A. Disclosure of Good Corporate Governance Implementation Comprising of 7 (seven) Aspects of Good Corporate Governance Principles

1. The Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors

As of 31 December 2012 and 2011, numbers and formation also composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

No	Jabatan/Title	2012		2011		Domisili/Domicile
		Nama/Names	Kewarganegaraan/Citizenship	Nama/Names	Kewarganegaraan/Citizenship	
1	Presiden Komisaris (Independen)/President Commissioner (Independent)	Enrique V. Bernardo	Filipina/Filipino	Enrique V. Bernardo	Filipina/Filipino	Filipina/Philippines
2	Komisaris/Commissioner	Bill Foo Say Mui	Singapura/Singaporean	Bill Foo Say Mui	Singapura/Singaporean	Singapura/Singapore
3	Komisaris Independen/Independent Commissioner	Jusuf Arbianto Tjondrolukito	Indonesia/Indonesian	Jusuf Arbianto Tjondrolukito	Indonesia/Indonesian	Indonesia/Indonesia
4	Komisaris Independen/Independent Commissioner	Anies Rasyid Baswedan ²	Indonesia/Indonesian	Ending Fadjar ¹	Indonesia/Indonesian	Indonesia/Indonesia



¹ Sesuai Sirkular Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANZ Panin Bank tertanggal 12 Mei 2011, pemegang saham memutuskan untuk tidak memperpanjang jabatan Saudara Ending Fadjar sebagai Komisaris Independen Bank.

² Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Anies Rasyid Baswedan sebagai Komisaris Independen Bank melalui surat Gubernur Bank Indonesia tertanggal 3 September 2012.

¹ In accordance with the Circular Resolution of PT ANZ Panin Bank Extraordinary Meeting of Shareholders dated 12 May 2011, Bank's shareholders decided not to extend Ending Fadjar's tenure as the Bank's Independent Commissioner.

² Bank Indonesia approved the appointment of Anies Rasyid Baswedan as the Bank's Independent Commissioner through the Governor of Bank Indonesia approval letter dated 3 September 2012.

→ Tranparansi didefinisikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi dan proses pengambilan keputusan. / *Transparency is defined as openness in delivering material and relevant information as well as openness in the decision making process.*

Dengan telah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia atas pengangkatan Anies Rasyid Baswedan sebagai Komisaris Independen Bank, maka komposisi Dewan Komisaris, yang diketuai oleh Enrique V. Bernardo sebagai Presiden Komisaris, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan antara lain sebagai berikut:

- Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen
- Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
- Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia

Terkait dengan fungsi pengawasan yang harus dilakukannya, Dewan Komisaris secara teratur menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasinya terhadap Dewan Direksi Bank. Selama tahun 2012, telah dilaksanakan 5 (lima) kali rapat Dewan Komisaris.

Untuk pembagian tugas Dewan Komisaris, Bank telah memiliki dokumen Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, yang secara garis besar mengatur tentang pedoman dan tata tertib kerja, termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. Dokumen tersebut juga mendefinisikan tugas Dewan Komisaris yang mencakup fungsi:

- Pengawasan terhadap pelaksanaan GCG.
- Pengawasan Strategik.
- Pengawasan terhadap Risiko.

As the Bank has obtained Bank Indonesia approval for the appointment of Anies Rasyid Baswedan as the Bank's Independent Commissioner, therefore the composition of Board of Commissioners, headed by Enrique V. Bernardo as the President Commissioner, has fulfilled the requirements defined as follows:

- The Board of Commissioners shall consist of Commissioners and Independent Commissioners
- At least 50% (fifty percent) of the number of the Board of Commissioners members shall be Independent Commissioners
- The members of the Board of Commissioners shall be no less than 3 (three) persons and not more than the number of the Board of Directors members
- At least 1 (one) member of the Board of Commissioners must be domiciled in Indonesia

With respect to the supervisory function, the Board of Commissioners holds regular meetings and provides recommendations to the Board of Directors. In 2012, the Board of Commissioners has been conducted 5 (five) meetings.

With regards to allocation of duties among members of the Board of Commissioners, Bank prepared a document outlining the Duties and Authorities of the Board of Commissioners stipulating guidelines and working orders, including work etiquettes, working hours and frequency of meetings. The document also described the duties of the Board of Commissioners covering:

- Supervision of GCG implementation.
- Strategic Supervision.
- Supervision of Risks.

Susunan Dewan Direksi Bank pada tahun 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: Composition of Bank Board of Directors in 2012 and 2011 is as follows:

No	Jabatan/Title	2012		2011		Domisili/Domicile
		Nama/Names	Kewarganegaraan/Citizenship	Nama/Names	Kewarganegaraan/Citizenship	
1	Presiden Direktur/ President Director	Joseph Abraham	Singapura/ Singaporean	Joseph Abraham	Singapura/ Singaporean	Indonesia
2	Wakil Presiden Direktur <i>Consumer Banking</i> / Vice President Director Consumer Banking	Ajay Surendra Mathur	India/Indian	Ajay Surendra Mathur	India/Indian	Indonesia
3	Direktur <i>Institutional Banking</i> / Director of Institutional Banking			Ngo Jerry Go ¹	Singapura/ Singaporean	Indonesia
4	Direktur Kepatuhan dan Legal/ Director of Compliance and Legal	Muhamadian Rostian	Indonesia/ Indonesian	Muhamadian Rostian	Indonesia/ Indonesian	Indonesia
5	Direktur Treasuri/ Director of Treasury	Martin Mulwanto	Indonesia/ Indonesian	Martin Mulwanto	Indonesia/ Indonesian	Indonesia
6	Direktur Bisnis Pembiayaan Konsumen/ Director of Consumer Finance	Luskito Hambali	Indonesia/ Indonesian	Luskito Hambali	Indonesia/ Indonesian	Indonesia
7	Direktur Perbankan Ritel/ Director of Retail Banking	Anthony Soewandy	Indonesia/ Indonesia	Anthony Soewandy	Indonesia/ Indonesian	Indonesia

¹ Per tanggal 12 Maret 2012, Ngo Jerry Go mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur *Institutional Banking* yang disetujui pemegang saham Bank melalui Sirkuler Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank ANZ Indonesia tertanggal 18 Juni 2012.

¹ On 12 March 2012, Ngo Jerry Go resigned as Director of Institutional Banking which then being approved by Bank's shareholders through the Circular Resolution of PT Bank ANZ Indonesia Extraordinary Meeting of Shareholders dated 18 June 2012.

Komposisi Dewan Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk GCG serta penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan BI No. 9/8/PBI/2007, yaitu sebagai berikut:

- Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Selama tahun 2012, telah dilaksanakan 12 (dua belas) kali rapat Dewan Direksi.

The composition of Board of Directors of the Bank has fulfilled the prevailing regulation of GCG and Expatriate Usage as stipulated in BI regulation No. 9/8/PBI/2007 as follows:

- The number of Board of Directors' members shall be no less than 3 (three) persons.
- All members of the Board of Directors must be domiciled in Indonesia.
- The Board of Directors shall be led by a President Director or a Chief Director.
- The majority of members of Directors have to be Indonesian citizens.

In 2012, the Board of Directors has conducted 12 (twelve) meetings.

Keseluruhan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Direksi telah dimasukkan ke dalam deskripsi dan uraian jabatan masing-masing anggota Direksi, yang pencapaiannya akan dinilai melalui pemantauan kinerja anggota Direksi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur**
Bertanggung jawab terhadap keseluruhan aspek bisnis dan operasional Bank, termasuk fungsi pendukung keuangan, perpajakan, teknologi informasi dan sumber daya manusia. Pejabat eksekutif yang melapor kepada Presiden Direktur termasuk Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) atau *Chief Risk Officer* (CRO).
- Wakil Presiden Direktur *Consumer Banking***
Bertanggung jawab terhadap *consumer banking* yang meliputi ritel dan *wealth*, termasuk diantaranya perbankan ritel dan *consumer finance*. Selain Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur juga mewakili Bank dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal.
- Direktur *Institutional Banking***
Bertanggung jawab atas keseluruhan perbankan korporasi, termasuk *trade finance*, *cash management*, perbankan komersial dan *private banking*.
- Direktur Kepatuhan dan Legal**
Bertanggung jawab memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan hukum yang berlaku serta perjanjian atau komitmen terhadap pihak ketiga.
- Direktur Treasuri**
Bertanggung jawab terhadap bisnis treasuri Bank serta manajemen likuiditas (termasuk pengelolaan aset dan liabilitas) dan juga permodalan Bank.
- Direktur Perbankan Ritel**
Bertanggung jawab terhadap keseluruhan aspek bisnis perbankan ritel, termasuk *signature priority banking* dan *wealth management*.
- Direktur Bisnis Pembiayaan Konsumen**
Bertanggung jawab terhadap keseluruhan aspek bisnis Pembiayaan Konsumen, baik di segmen Kartu Kredit maupun Pinjaman Personal.

The duties, responsibilities and authorities of Board of Directors have been included in the job description of each members of Board of Directors, which the achievement will be assessed through performance assessment.

Duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

- President Director**
Responsible for the whole aspects of the Bank's business and operations, including financial support functions, taxation, information technology and human resources. Executive officers who reports to the President Director are including the Head of Internal Audit Unit (IAU) and Head of the Risk Management Unit (RMU) or Chief Risk Officer (CRO).
- Vice President Director of *Consumer Banking***
Responsible for consumer banking, encompassing retail and wealth, including also retail banking and consumer finance. Besides the President Director, the Vice President Director is also authorised to represent the Bank in engaging with external parties.
- Director of *Institutional Banking***
Responsible for the overall activities of corporate banking, including trade finance, cash management, commercial banking and private banking.
- Director of Compliance and Legal**
Responsible for ensuring compliance with regulations and applicable laws and agreements and/or commitments with third parties.
- Director of Treasury**
Responsible for the Bank's treasury business and liquidity management (including assets and liabilities management) and also Bank's capital.
- Director of Retail Banking**
Responsible for the overall aspects of the retail banking business, including the signature priority banking and wealth management.
- Director of Consumer Finance**
Responsible for the overall aspects of the Consumer Finance business, both in the Credit Card and Personal Loan segments.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Sebagai salah satu sarana untuk membantu menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

a) Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Komite Audit diketuai oleh seorang komisaris independen dan beranggotakan dua pihak independen yang memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BI. Komite Audit Bank beranggotakan pihak-pihak di bawah ini:

- Jusuf Arbianto Tjondrolukito, sebagai ketua sekaligus mewakili peran komisaris independen dalam komite.
- Adriana Muliando, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.
- Herlanto Anggono, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang perbankan.

Tugas, wewenang, tanggung jawab dan pedoman kerja dari Komite Audit tersebut di atas, secara menyeluruh telah dituangkan dalam bentuk Piagam Komite Audit.

Sepanjang tahun 2012, telah dilakukan 5 (lima) kali rapat Komite Audit, yakni pada tanggal 12 Januari 2012, 12 Maret 2012, 26 Juni 2012, 6 September 2012 dan 28 November 2012.

b) Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Sirkular Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANZ Panin Bank tertanggal 12 Mei 2011, pemegang saham memutuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Ending Fadjar sebagai Komisaris Independen PT ANZ Panin Bank yang menyebabkan kekosongan posisi ketua Komite Pemantau Risiko yang sebelumnya dijabat oleh Ending Fadjar. Atas hal tersebut, maka untuk sementara waktu Enrique V Bernardo selaku Presiden Komisaris mengambil alih posisi Ketua Komite Pemantau Risiko.

2. Completeness and Implementation of the Tasks of Committees

As one of instruments to support the execution of their supervisory function, the Board of Commissioners has established Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee.

a) Audit Committee

According to the stipulation written in BI regulation No. 8/4/PBI/2006 concerning Good Corporate Governance Implementation by Commercial Banks, Audit Committee is to be led by an independent commissioner and has two independent members having qualifications as defined in the mentioned BI regulation. Audit Committee of the Bank is composed of the following parties:

- Jusuf Arbianto Tjondrolukito is the Chairman of the Committee and acts as an independent commissioner in the committee.
- Adriana Muliando is an independent party with expertise in finance.
- Herlanto Anggono is an independent party with expertise in banking industry.

Duties, authorities, responsibilities and working guidelines of the above mentioned Audit Committee, have been documented in Audit Committee Charter.

Throughout 2012, 5 (five) meetings have been conducted by the Audit Committee on 12 January 2012, 12 March 2012, 26 June 2012, 6 September 2012 and 28 November 2012.

b) Risk Monitoring Committee

Based on the Circular Resolution of PT ANZ Panin Bank Extraordinary Meeting of Shareholders dated 12 May 2011, the shareholders decided not to extend Ending Fadjar's tenure as a PT ANZ Panin Bank Independent Commissioner resulting vacant position for the position of the Chairman of the Risk Monitoring Committee previously held by Ending Fadjar. Thus, Enrique V Bernardo as the President Commissioner temporarily takes over the position of the Chairman of the Risk Monitoring Committee.

Per tanggal 28 November 2012, Dewan Komisaris mengangkat Anies Rasyid Baswedan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko melalui Keputusan Dewan Komisaris.

Tidak terdapat perubahan pada komposisi keanggotaan dari Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- Adriana Muliando, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.
- Herlanto Anggono, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang manajemen risiko.

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggung jawab utama yang diemban oleh komite ini adalah untuk mengevaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dari Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sendiri.

On 28 November 2012, the Board of Commissioners through its resolution, appointed Anies Rasyid Baswedan as the Chairman of the Risk Monitoring Committee.

There is no change to the membership composition of the Risk Monitoring Committee as follows:

- Adriana Muliando, acting as an independent party with expertise in finance.
- Herlanto Anggono, acting as an independent party with expertise in risk management.

According to the Risk Monitoring Committee Charter, the duties and responsibilities carried out by this Committee is to evaluate the suitability between risk management policy and the execution, and also to conduct supervision and evaluation on the execution of duties of Risk Management Committee and Risk Management Unit.



Dalam rangka mewujudkan program kerja seperti telah disebutkan di atas, Bank secara berkala menyampaikan laporan-laporan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh kedua komite tersebut kepada Dewan Komisaris, seperti misalnya hasil audit berkala yang dilakukan oleh SKAI Bank, risalah rapat Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara bulanan serta hasil audit yang dilakukan baik oleh ANZ Group, auditor eksternal, maupun audit tahunan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Sepanjang tahun 2012, telah dilakukan 5 (lima) kali rapat Komite Pemantau Risiko, yakni pada tanggal 12 Januari 2012, 12 Maret 2012, 26 Juni 2012, 6 September 2012 dan 28 November 2012.

c) Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam rangka memenuhi komitmennya untuk melaksanakan *Good Corporate Governance*, pada tanggal 30 Juni 2008, Bank membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang beranggotakan:

- Enrique V. Bernardo, sebagai ketua yang juga mewakili peranan komisaris independen dalam komite.
- Bill Foo Say Mui, anggota komite yang juga merupakan komisaris Bank.
- Sulianti Setiabudi, berperan sebagai anggota komite yang merupakan pejabat eksekutif yang membawahi bagian sumber daya manusia Bank.

Fungsi dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, serta kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

In order to accomplish the working programs mentioned above, Bank periodically delivers reports to the Board of Commissioners in relation with supervision and monitoring functions done by those two committees, such as the results of periodic audits performed by Bank's Internal Audit Unit, minutes of meetings of Risk Management Committee done on monthly basis, as well as the results of the audit performed by the ANZ Group, external auditor, and Bank Indonesia annual audit team.

Throughout 2012, 5 (five) meetings have been held by the Risk Monitoring Committee on 12 January 2012, 12 March 2012, 26 June 2012, 6 September 2012 and 28 November 2012.

c) Remuneration and Nomination Committee

In order to fulfill the commitment to conduct Good Corporate Governance, on 30 June 2008, the Bank has established a Remuneration and Nomination Committee whose members are:

- Enrique V. Bernardo as the Chairman and independent commissioner.
- Bill Foo Say Mui as committee's member who is also the Bank's commissioner.
- Sulianti Setiabudi acts as committee's member who is also the executive officer heading Human Resource Division of the Bank.

The functions and responsibilities of Remuneration and Nomination Committee are as follows:

- Conduct evaluation on remuneration policy, which include giving recommendation concerning remuneration policy to the Board of Commissioners Board of Commissioners and the Board of Directors, to be submitted to the General Meeting of Shareholders. Also the remuneration policy for executive officers and the all employees to be submitted to the Board of Directors.
- Provides recommendation with regards to the policy and procedures for the appointment and replacement of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.

- Jika terdapat kekosongan jabatan atau perekrutan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Direksi baru, maka komite ini juga dapat memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tersebut kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan 3 (tiga) kali Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 12 Januari 2012, 12 Maret 2012 dan 26 Juni 2012.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal

a) Fungsi Kepatuhan

Dalam upayanya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan BI maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang dikepalai oleh seorang Direktur. Satuan kerja Kepatuhan ini bersifat independen terhadap satuan kerja operasional, karena tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional Bank sehari-hari.

Di bawah Direktur Kepatuhan dan Legal saat ini terdapat dua divisi, yaitu divisi Kepatuhan dan divisi Legal. Pembentukan divisi Legal merupakan langkah Bank untuk memitigasi risiko hukum sejalan dengan rencana ekspansi Bank.

Lebih lanjut, untuk memperkuat fungsi pengawasan dari satuan kerja Kepatuhan, maka divisi Kepatuhan dibagi menjadi 2 (dua) unit kerja, yaitu unit kerja Kepatuhan - Institusional, Ritel dan MLRO dan unit kerja Kepatuhan - Consumer Finance dan Proyek. Unit kerja Kepatuhan - Institusional, Ritel dan MLRO bertanggung jawab antara lain untuk mengkoordinasi dan mengelola risiko kepatuhan untuk bisnis Institusional dan Ritel dan penerapan

- If there is a vacancy or new recruitment in the Board of Commissioners or Board of Directors, then this committee may also provide recommendation on the candidate for the aforementioned Board member to the Board of Commissioners which subsequently submitted to the General Meeting of Shareholders.

Throughout 2012, the Nomination and Remuneration Committee meeting has conducted 3 (three) times on 12 January 2012, 12 March 2012, and 26 June 2012.

3. The Implementation of Compliance, Internal Audit, and External Audit Functions

a) Compliance Function

In order to ensure compliance of BI regulations and other prevailing regulations, Bank has established a Compliance Business Unit led by a Compliance Director. This Compliance unit is independent from operational business unit as it does not take part in Bank's daily operational activities.

Under the Director of Compliance and Legal, there are two divisions, namely Compliance and Legal divisions. The forming of the Legal division is part of the Bank's strategy to mitigate legal risk in relation with Bank's expansion.

Furthermore, in order to strengthen the supervisory function of the Compliance unit, the Compliance Department is divided into 2 (two) units, namely Compliance - Institutional, Retail and MLRO and Compliance - Consumer Finance and Project. Compliance - Institutional, Retail and MLRO is responsible for coordinating and managing compliance risk for Institutional and Retail business and the implementation of Know Your Customer/

→ Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. / *Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee are established to support the the Board of Commissioners supervisory function.*



prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*) dan anti pencucian uang (*Anti Money Laundering/AML*) serta memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur yang terkini untuk seluruh satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh jenjang organisasi. Sedangkan unit kerja Kepatuhan - *Consumer Finance* dan Proyek berperan dalam memastikan aspek kepatuhan Divisi *Consumer Finance* dan setiap proyek terkait dengan rencana ekspansi bisnisnya, yang antara lain meliputi antara lain pembukaan cabang baru dan peluncuran produk baru.

Sepanjang tahun 2012, beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja Kepatuhan antara lain:

- Melakukan analisis dan identifikasi produk dan kegiatan baru untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
- Melakukan sosialisasi terhadap pejabat dan petugas dari unit kerja terkait mengenai adanya peraturan baru yang berlaku.
- Melakukan sosialisasi mengenai kepatuhan atas pelaksanaan KYC dan AML terhadap bisnis unit terkait.
- Melakukan pelaporan kepada regulator terkait dengan adanya transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan.

KYC and Anti Money Laundering/AML principles as well as ensuring the availability and suitability of current guidelines, systems and procedures for all business units with prevailing law, at all stages of the organization. Meanwhile, the Compliance - Consumer Finance and Project acts to ensure the aspect of compliance in Consumer Finance and every project related to the business expansion, among others are new branches opening and new products launching.

During 2012, there were some work programs that had been completed by Compliance unit, among others:

- Conducted analysis and identification on new products and activities to ensure compliance with prevailing regulations.
- Conducted socialization to officials and officers from relevant business units concerning new and relevant regulations.
- Conducted socialization of KYC and AML implementation for relevant business units.
- Submitted reports of cash and suspicious transactions to the relevant regulators.

- Implementasi skenario baru untuk pengawasan transaksi keuangan mencurigakan.
- Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Pembisik (*Whistleblower Protection Policy*) dimana Bank mendorong staf untuk melaporkan kemungkinan tindakan tercela/pelanggaran/tindakan tidak etis.
- Penunjukan *Whistleblower Protection Champions*.
- Mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kasus-kasus pelanggaran *fraud* yang terjadi di Bank dan pelajaran yang dapat dipetik dari kasus tersebut sehingga tidak terulang kembali di masa yang akan datang melalui *Message from Compliance*.
- Memiliki Kebijakan KYE (*Know Your Employee*) sebagai salah satu wujud penerapan anti pencucian uang dan strategi *anti-fraud*.
- Melaksanakan *compliance testing* sebagai bagian dari aktivitas *quality assurance* terhadap implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Membina hubungan baik dengan Pemerintah dan Bank Sentral (BI) serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku regulator.

Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2012 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank telah menyusun Laporan Direktur Kepatuhan untuk Semester I (pertama) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan Semester II (kedua) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen kepada otoritas yang berwenang relatif baik.

Pada tahun 2012, terdapat beberapa pelanggaran berupa kekeliruan dan keterlambatan pelaporan dan koreksi pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID), keterlambatan penyampaian koreksi LBBU, kesalahan pelaporan LBU, perbedaan penilaian kolektibilitas kredit serta keterlambatan pelaporan transaksi efek.

Pada tanggal 17 Januari 2012, telah terjadi pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang disebabkan oleh kesalahan perhitungan internal Bank. Atas kejadian pelampauan BMPK tersebut di atas, Bank telah menyampaikan *Action Plan* serta Realisasi terhadap *Action Plan* kepada Bank Indonesia.

- Implementation of new detection scenarios for monitoring suspicious transactions.
- Socialization of the Whistleblower Protection Policy where the Bank encourages its staff to report the possibilities of reportable actions/violations/unethical conduct.
- The appointment of Whistleblower Protection Champions.
- Communicating to all employees regarding the cases of frauds which have occurred at the Bank and the lessons learned from such cases in order to avoid repeated cases the in the future through Message from Compliance.
- Having a KYE (Know Your Employee) Policy as one of the forms of the implementation of the anti-money laundering and anti-fraud strategy.
- Conduct compliance testing as part of quality assurance activity on the regulatory implementation within business units.
- Fostering good relations with the government and the central bank (BI) and the FSA (Financial Service Authority).

In order to fulfill the Bank's obligation to provide the report of the principal duties of the Director of Compliance to Bank Indonesia as stipulated by Bank Indonesia Regulation No.13/2/PBI/2012 concerning the Implementation of the Compliance Function for Commercial Banks, Bank has prepared the report of the Director of Compliance for the First Semester ended on 30 June 2012 and Second Semester ended on 31 December 2012.

In general, Bank's compliance level towards stipulations and prevailing regulations as well as fulfillment of all commitments to regulators is good.

In 2012, there were some violations such as error and late submission of report and correction report to Debtor Information System, late submission for Commercial Bank Periodic Report, error on Commercial Bank Monthly report, differences in assessment of the collectibility of loans as well as the delayed reporting of securities transactions.

Due to internal miscalculation, on 17 January 2012, there was excess on the Legal Lending Limit. With regards to this incident, Bank has submitted Action Plan as well as the realization of the Action Plan to Bank Indonesia.

Atas pelanggaran yang terjadi, Bank memiliki catatan yang lengkap atas semua insiden dan teguran Bank Indonesia dalam BOLD (*Bankwide Operational Loss Database*) dan telah meminta departemen terkait untuk memperbaiki kesalahan sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang dan senantiasa melakukan pelaporan secara tepat waktu dan tepat isi.

b) Fungsi Audit Internal

Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang melapor secara langsung kepada Presiden Direktur Bank dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Sesuai dengan Internal Audit Charter, misi dari SKAI PT Bank ANZ Indonesia adalah memberikan keyakinan atas penilaian yang independen dan obyektif serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan menjaga nilai pemegang saham.

SKAI merupakan unit yang independen dan tidak memiliki kendali langsung terhadap unit atau kegiatan operasional yang menjadi obyek pemeriksaan.

SKAI memiliki akses yang tidak terbatas atas seluruh kegiatan, catatan, properti dan personil dari PT. Bank ANZ Indonesia. Ruang lingkup Audit Internal meliputi seluruh entitas audit di PT. Bank ANZ Indonesia.

Sebagai pedoman bagi SKAI, Bank telah menyusun Piagam Audit Internal yang telah ditanda tangani oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif dan komprehensif, SKAI melakukan kaji ulang secara berkala atas kegiatan operasional Bank, kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal Bank.

Pada tahun 2012, SKAI PT Bank ANZ Indonesia telah melaksanakan audit atas 20 entitas audit (100% dari rencana audit tahun 2012) berdasarkan perencanaan audit berbasis risiko yang mencakup: Sumber Daya Manusia, Risiko Kredit, Treasury, Kajian Pengendalian Keuangan Kunci (Keuangan), Keberlanjutan Layanan Teknologi, Manajemen Perubahan Teknologi, Investasi dan Asuransi, Kajian Pengendalian Kunci Jaringan Kantor, Sistem Pembayaran: SKN dan RTGS, APU/PPT, Manajemen Risiko atas Kerangka Kepatuhan pada Peraturan, Pengecekan Kesehatan Risiko Kredit dan audit 8 kantor cabang.

With regards to said breaches, Bank has completely listed all of those incidents and Bank Indonesia warnings in BOLD (*Bankwide Operational Loss Database*) and has requested relevant departments to rectify the mistake and ensure that similar mistake can be prevented in the future and continue to submit reports in a timely manner and with precise content.

b) Internal Audit Function

Bank has established Internal Audit Unit which reports directly to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.

Pursuant to the Internal Audit Charter, the mission of PT Bank ANZ Indonesia's Internal Audit is to provide assurance of an independent and objective assessment also to give consultancy services that will assist the Board of Commissioners and Board of Directors to meet their statutory obligations and protect the interest of Bank's stakeholder.

The Internal Audit Unit is an independent unit and has no direct authority over the business unit or operational activities being reviewed.

Internal Auditors have unlimited access to all activities, records, properties and employees of PT Bank ANZ Indonesia. The Internal Audit's scope covers all audit entities within PT Bank ANZ Indonesia.

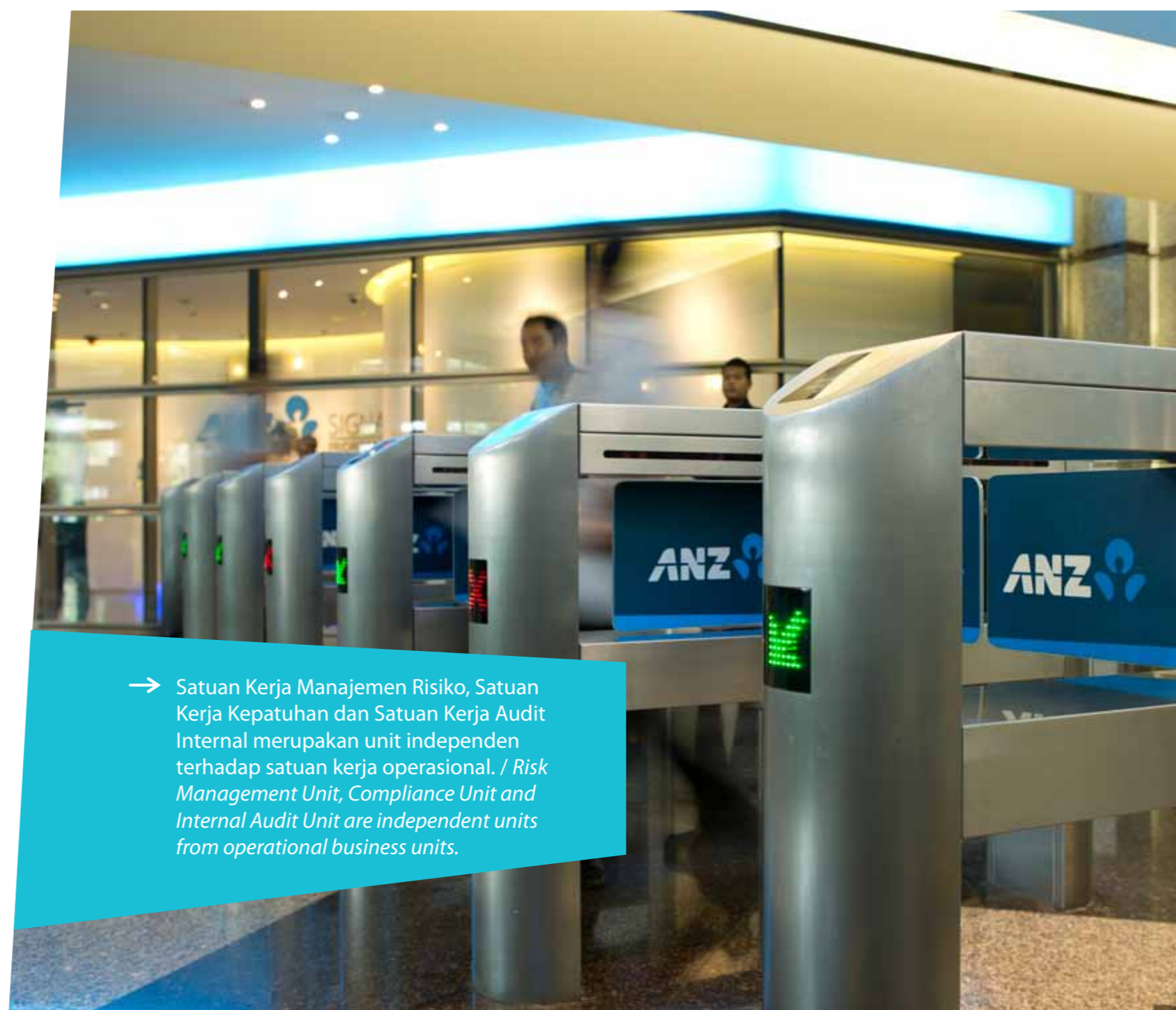
As a guideline for Internal Audit Unit, Bank had established an Internal Audit Charter which had been ratified by the President Director and the Board of Commissioners.

In carrying out effective and comprehensive internal audit function, the Internal Audit Unit conducts reviews on a regular basis of the Bank's operational activities, the adequacy and effectiveness of Bank's internal control system.

In 2012, PT Bank ANZ Indonesia's Internal Audit Unit performed audits on 20 entities (100% of the 2012 plan) based on a risk-based audit plan which covers: Human Resources, Credit Risk, Treasury, Key Financial Control Review (Finance), Technology Service Continuity, Technology Change Management, Investment and Insurance, Key Control Review for Retail Branch Network, Payment System: National Clearing System and RTGS, AML/ CTF, Risk Management for Regulatory Framework, Credit Risk Health Check and audit to 8 branches.

Hasil audit dikemukakan dalam pertemuan bulanan Dewan Direksi serta pertemuan bulanan Komite Manajemen Risiko. Hasil dari kaji ulang yang merupakan penilaian yang signifikan juga disampaikan kepada Komite Audit sebagai sarana Komite Audit untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas SKAI.

The audit result is presented in the monthly meetings of the Board of Directors and monthly meetings of the Risk Management Committee. The audit results and significant audit findings relating to the control of the Bank's activities from this review are also submitted to the Audit Committee which conducts supervision and evaluation on the execution of Internal Audit Unit duties.



→ Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal merupakan unit independen terhadap satuan kerja operasional. / Risk Management Unit, Compliance Unit and Internal Audit Unit are independent units from operational business units.



SKAI secara berkala melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut temuan audit dan rekomendasinya, serta menginformasikan hasilnya baik kepada pihak internal melalui *e-mail* maupun kepada Bank Indonesia dalam bentuk laporan audit internal yang disampaikan setiap enam bulan.

Memenuhi ketentuan GCG serta kepatuhan SKAI terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB), SKAI Bank telah diaudit oleh pihak eksternal untuk memastikan efektivitas SKAI dalam melaksanakan tugasnya. Audit atas SKAI tersebut terakhir dilakukan pada Desember 2011 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Rekan.

Sesuai arahan Bank Indonesia, Bank melakukan penguatan fungsi SKAI melalui beberapa inisiatif fokus. Untuk 2012, fokus dilakukan adalah mempertahankan jumlah staf untuk pemenuhan pelaksanaan rencana audit yang berbasis risiko, meningkatkan kompetensi staff melalui program pengembangan dan pelatihan dan memperbaiki metodologi pemeriksaan untuk membantu manajemen mencapai proses pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Internal Audit Unit periodically conducts supervision on the development of follow up actions towards audit findings and recommendations, and also informs the results to internal parties through e-mail and to Bank Indonesia in the form of internal audit report submitted on a semi-annual basis.

In fulfilling the GCG requirements and compliance with Standard of Implementation of Bank's Internal Audit Function, Internal Audit Unit has been audited by an external party to ensure its effectiveness in conducting their duties. The latest audit of the Bank's Internal Audit Unit was conducted in December 2011 by the Public Accounting Firm Weddie Andriyanto & Partners.

In line with the direction from Bank Indonesia, Bank is strengthening its Internal Audit function through several focus initiatives. For 2012, focus initiatives include maintaining the number of staff that is required to fulfill a commensurate risk-based audit plan, increase competency by implementing a staff development program and improve audit methodology to aim in assisting management to achieve better effectiveness in the risk management process, internal controls and good corporate governance.

SKAI telah membuat rencana audit yang berbasis risiko yang menyesuaikan dengan area yang memiliki potensi keprihatinan terbesar dan termasuk mempertimbangkan ekspektasi dari regulator.

SKAI juga telah memiliki program pelatihan dan pengembangan tahunan yang mencakup pelatihan dasar, kemampuan teknis dan kepemimpinan. Staf juga diharuskan untuk memperbaharui pemahaman independensi melalui pelatihan *code of conduct* yang dilakukan secara tahunan.

Metodologi pemeriksaan yang baru juga diperkenalkan untuk menilai pemahaman pengertian manajemen mengenai lingkungan risiko dan pengendalian dan dalam menerapkan perbaikan berkelanjutan dan tepat waktu atas pengendalian internal yang tidak mencukupi.

Bank tetap mempertahankan jumlah staf SKAI hingga menjadi 9 (sembilan) orang per posisi 31 Desember 2012. Di bulan Oktober 2012, Bank memutuskan untuk menggabungkan bagian *Security and Investigations* ke dalam struktur organisasi SKAI. Namun, pada bulan April 2013, Bank kembali melakukan restrukturisasi unit yang menangani investigasi dengan melepaskan fungsi *Security* dari SKAI sehingga unit yang menangani insiden operasional dengan tipe kecurangan (*fraud*) berganti nama menjadi *Group Investigations* (dahulu "*Security and Investigations*") yang bertanggung jawab kepada *Chief Risk Officer* (CRO).

c) Fungsi Audit Eksternal

Selama beberapa tahun terakhir, Bank menunjuk KAP Siddharta Siddharta Widjaja, anggota dari KPMG International, sebagai auditor eksternal dari Bank. KAP ini tercatat sebagai salah satu dari empat KAP besar dan terkemuka, baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Fakta tersebut di atas juga merupakan salah satu pertimbangan utama dari Bank dalam melakukan penunjukan KAP Siddharta Siddharta Widjaja. Karena posisinya sebagai salah satu dari empat KAP besar dan terkemuka, diharapkan agar KAP ini memiliki kapasitas untuk bersikap independen dan profesional, dalam melakukan kegiatan auditnya terhadap Bank.

Internal Audit Unit has developed a risk based audit plan which is aligned with areas of greatest impact including keeping pace with regulatory expectations.

Internal Audit Unit has developed annual staff training and development programs that cover basic training, technical skills and leadership. Staff are also required to maintain independency through annually attending a code of conduct refreshment course.

A new audit methodology is also introduced that evaluates management's awareness of their risk and control environment and effectiveness in controlling deficiencies in a sustained and timely manner.

Bank maintains the Internal Audit Unit staff to 9 (nine) people as of 31 December 2012. In October 2012, Bank decided to integrate the Security and Investigation department into the Internal Audit Unit organizational structure. However, in April 2013, Bank performed another restructurization of the unit that handle investigations by releasing the Security function from Internal Audit, thus the unit handling operational incidents of the fraud type changed its name to Group Investigations (Previously "Security and Investigations") reporting to the Chief Risk Officer (CRO).

c) External Audit Function

In the last few years, Bank has been appointing Public Accounting Firm Siddharta Siddharta Widjaja, a member of KPMG International, as the external auditor of the Bank. This is one of the big four Public Accounting Firm in Indonesia and worldwide.

The above mentioned fact is one of the Bank's main considerations in appointing Public Accounting Firm Siddharta Siddharta Widjaja. Owing to its big-four position, this Public Accounting Firm is expected to be independent and professional in conducting their audit on the Bank.

Penunjukan KAP Siddharta Siddharta Widjaja sebagai auditor Bank dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit tertanggal 26 Juni 2012 yang kemudian disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham, dan terdokumentasi dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 28 Juni 2012. Penunjukan ini telah mempertimbangkan keharusan untuk melakukan penggantian auditor eksternal setiap lima tahun sekali.

The appointment of Public Accounting Firm Siddharta Siddharta Widjaja as the Bank's auditor was done based on recommendation from Audit Committee dated 26 June 2012 and approved through the General Meeting of Shareholders, and documented in the Circular Resolution of General Meeting of Shareholders dated 28 June 2012. This appointment has considered the necessity to replace an external auditor once in five years.

4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal

Bank menyadari bahwa perkembangan pesat dunia perbankan secara langsung mempengaruhi kondisi internal dan eksternal dari kegiatan usaha Bank, yang menyebabkan meningkatnya potensi risiko yang dihadapi oleh Bank. Oleh karena itu, Bank senantiasa berusaha untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha Bank.

Bank telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko pada tahun 2004, yang secara garis besar mengemukakan tentang pedoman umum penerapan manajemen risiko. Kebijakan ini mengatur tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan kebijakan, prosedur, penetapan limit, proses penerapan Manajemen Risiko, pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko yang dihadapi oleh Bank. Pembuatan atas kebijakan Manajemen Risiko juga menunjukkan adanya keterlibatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam penerapan Manajemen Risiko.

Secara garis besar, risiko-risiko utama yang dihadapi oleh Bank mencakup antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko stratejik.

Pada tahun 2010, Bank juga telah membentuk unit kerja manajemen risiko pasar untuk mengelola risiko pasar Bank.

4. The Implementation of Risk Management including Internal Control System

Bank realized that the development of the banking industry has directly influenced the internal and external conditions of the Bank's business activities, which has caused the increase of potential risk faced by Bank. Therefore, Bank always endeavours to implement effective risk management in accordance with the goals, business policies, size and complexity of Bank's business.

Bank has established the Risk Management Policy in 2004, which generally includes the general guidelines of risk management implementation. This policy regulates duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Risk Management Committee also the Risk Management Unit, and procedure, policy, limit determination, implementation process of risk management, internal control in implementing risk management for each risk faced by Bank. The establishment of the Risk Management Policy indicates the active involvement of the Board of Commissioners and the Board of Directors in risk management implementation.

In general, the main risks faced by Bank are credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputational risk, compliance risk and strategic risk.

In 2010, Bank had also established a market risk management unit to manage the Bank's market risk.



→ Bank mewujudkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dari Dewan Direksi terkait penerapan manajemen risiko. / Bank creates an active supervision from the Board of Commissioners and the Board of Directors related to risk management implementation.

Untuk lebih jelasnya, proses penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Bank antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Sebagai salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Bank telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, terkait dengan penerapan manajemen risiko.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan penerapan Manajemen Risiko tercermin dalam dokumen Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, yang menyatakan dengan jelas bahwa salah satu tugas utama Dewan Komisaris adalah untuk mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan sehubungan dengan ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan tanggung jawab manajemen risiko dan kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko sendiri berusaha untuk senantiasa melibatkan serta memberikan informasi terkini atas risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dengan menyampaikan setiap risalah rapat Komite Manajemen Risiko yang diadakan sekali dalam sebulan kepada Komite Pemantau Risiko serta anggota Dewan Komisaris.

Dalam rapat yang dilakukan secara bulanan ini, dikemukakan risiko-risiko terkini yang sedang dihadapi oleh Bank, termasuk di dalamnya pembahasan atas risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko hukum.

In order to be clearer, the process of risk management implementation that has been done by the Bank are as follows:

a) Active supervision from Board of Commissioners and Board of Directors

As part of the attempt to create an active supervision from the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Bank has determined the authorities and responsibilities of Board of Commissioners and the Board of Directors related to risk management implementation.

The duties and authorities of the Board of Commissioners in relation with the implementation of Risk Management is reflected in the document of Duties and Authorities of the Board of Commissioners, that states clearly that one of main duties of the Board of Commissioners is to evaluate and give approval towards risk management and compliance policy in accordance with the prevailing regulations, both internal and external, as well as to evaluate the execution of the duties of risk management and compliance.

The Risk Management Unit also makes its best efforts to participate and provide up to date information regarding any risks faced by the Bank by delivering every minutes of meeting of the Risk Management Committee that is held once in a month to the Risk Monitoring Committee and the members of the Board of Commissioners.

In this monthly meeting, current risks faced by the Bank are discussed, including discussions on credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, reputation risk and legal risk.



b) Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko dalam bentuk Standar Penerapan Manajemen Risiko yang merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategik Bank. Kebijakan ini disusun untuk masing-masing jenis risiko yang dihadapi oleh Bank, serta mempertimbangkan juga jenis produk dan transaksi perbankan yang disediakan oleh Bank.

Penetapan kebijakan manajemen risiko antara lain dilakukan dengan cara menetapkan strategi manajemen risiko, yang berusaha untuk memastikan bahwa:

- Bank tetap mempertahankan eksposur risiko yang sesuai dengan kebijakan, prosedur internal Bank, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
- Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian di bidang manajemen risiko, sesuai dengan kompleksitas dan kemampuan usaha Bank.

Untuk penetapan prosedur dan limit terkait dengan penerapan manajemen risiko, Bank sebagai salah satu anak perusahaan ANZ Group menerapkan sebagian kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh ANZ Group. Meskipun demikian, Bank sebagai sebuah entitas legal yang beroperasi secara mandiri di Indonesia, tetap memperhatikan *risk appetite* Bank berdasarkan pengalaman yang dimilikinya dalam mengelola risiko yang spesifik dihadapi oleh Bank dalam hubungannya dengan lokasi operasional Bank di Indonesia, yang mungkin memiliki beberapa perbedaan dengan kondisi ANZ Group.

Penetapan prosedur dan limit ini dilakukan untuk masing-masing jenis risiko dan terdokumentasi dalam kebijakan manajemen risiko. Sebagai contoh, untuk risiko kredit, Bank telah mengimplementasikan sebagian kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh ANZ Group, yaitu dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). Limit kredit ditetapkan secara global oleh ANZ Group dalam rangka menerapkan pengelolaan risiko yang terukur dengan baik dan konsisten. Bank juga telah memiliki kerangka kebijakan manajemen likuiditas serta adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan likuiditas.

b) Establishment of Risk Management Policy

Bank has established a risk management policy in the form of a written guideline in implementing risk management which was compiled in conjunction with the vision, mission, and strategic plans of the Bank. This policy was drafted for each type of risk faced by the Bank, and also taking into account the type of product and banking transaction provided by Bank.

The establishment of the risk management policy was done by defining risk management strategy to ensure that:

- The Bank maintains its risk exposure in accordance with its policy, internal procedures, and other prevailing regulations.
- The Bank is managed by resources having sound knowledge, experience, and skills in the risk management field, in accordance with the complexity and ability of the Bank's business.

In determining procedures and limits related to risk management implementation, Bank as one of the ANZ Group's subsidiaries implements some parts of risk management policy defined by the ANZ Group. However, Bank as an Indonesian legal entity that operates solely in Indonesia, also take into account its own risk appetite based on its experience in managing specific risks faced by a Bank with operational location in Indonesia that has some differences with the condition of the ANZ Group.

The implementation of these procedures and limits are done for each type of risk and documented in the risk management policy. For instance, for credit risk, Bank has implemented some policies and procedures determined by the ANZ Group, namely Guidance for Preparation of Bank's Credit Policies. Credit limit is determined globally by the ANZ Group in order to implement well measured and consistent risk management. Bank also has a liquidity management policy including segregation of duties and responsibilities in managing liquidity risk.

c) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank melakukan proses identifikasi risiko dengan tujuan mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang memiliki potensi untuk merugikan Bank dan mengukur profil risiko Bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.

Pengukuran risiko ini dapat dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran risiko oleh Bank dilakukan terhadap:

- Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
- Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
- Faktor risiko (*risk factor*) secara individual;
- Eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*), dengan mempertimbangkan korelasi risiko;
- Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Bank dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.

Penerapan pemantauan dan pengendalian risiko meliputi penetapan limit secara individual dan keseluruhan/konsolidasi. Penetapan limit dilakukan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur Bank dengan mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia. Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Direksi wajib untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap limit-limit yang telah ditetapkan.

Penetapan jenis limit meliputi:

- Limit transaksi/produk;
- Limit mata uang;
- Limit volume transaksi;
- Limit posisi terbuka;
- Limit kerugian;
- Limit intra hari;
- Limit nasabah dan *counterparty* individual;
- Limit pihak terkait;
- Limit industri/sector ekonomi dan wilayah

c) The Adequacy of Process of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Controlling Process as well as Risk Management Information System

Bank conducts risk identification process aimed at identifying all kinds of inherent risks in every functional activity that can inflict any potential loss to the Bank and to determine the Bank's risk profile in order to obtain a picture of the effectiveness of risk management implementation.

This risk measurement can be done quantitatively and qualitatively. The risk measurements are done by measuring:

- Sensitivity of products/activities from the changes in factors that influence them, both in normal and abnormal conditions;
- Probability of the changes in various factors based on past fluctuations and their correlations;
- Individual risk factors;
- Aggregate risk exposure by taking into account risk correlations;
- All inherent risks on all of the Bank's transactions and products that can be integrated into the Bank's management information system.

The implementation of risk monitoring and controlling covers both individual and consolidated limits. The limit determination was established by taking into account the ability of the Bank's capital to absorb risk exposure or the actual loss, and the level of the Bank's exposure by taking into account the past losses and also the capability of human resources. The Risk Management Unit, Risk Management Committee and Directors are obliged to ensure the Bank's compliance towards the defined limits.

The limit definition is composed of:

- transaction/product limit;
- currency limit;
- turnover limit;
- open position limit;
- cut loss limit;
- intra-day limit;
- individual borrower and counterparty limit;
- related parties limit;
- industry/economic sector and geographic limit

Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, antara lain ketentuan tentang Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Neto (PDN).

Sistem informasi manajemen risiko wajib dimiliki oleh Bank untuk menjamin:

- Terakurannya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur untuk masing-masing jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, serta eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional Bank;
- Dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko;
- Tersedianya hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

Dalam realisasinya, Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Bank mengukur hampir semua jenis risiko, terutama karena ANZ Group, sebagai pemegang saham mayoritas dan *parent bank*, telah memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai dalam hal ini.

Sementara itu, untuk risiko pasar dan risiko likuiditas, Bank telah menerapkan perhitungan VaR (*Value at Risk*) dan EaR (*Earning at Risk*) untuk mengukur dan memantau risiko pasar setiap harinya, serta model internal untuk mengukur kebutuhan kas dalam jangka waktu tertentu, yaitu model *Short-term Crisis* (STC) dan *Normal Business Condition* (NBC). Model STC digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan likuiditas 8 (delapan) hari ke depan, sementara model NBC digunakan untuk memproyeksi kebutuhan likuiditas sebulan ke depan.

Pada tahun 2010, Bank juga telah membentuk unit kerja manajemen risiko pasar untuk mengelola risiko pasar Bank.

Limit determination is done by taking into account prevailing Bank Indonesia Regulations including Capital Adequacy Ratio (CAR), Legal Lending Limit (LLL) and Net Open Position (NOP).

The Bank must have a risk management information system that can ensure:

- The risk exposure is accurately, informatively, and timely measured, both for aggregate risk exposure and exposure for each type of inherent risk on the Bank's business activity, and also risk exposure for each of the Bank's functional activity;
- Compliance with the implementation of risk management towards policy, procedures and risk limit definition;
- Availability of result of risk management implementation compared with the determined target in line with policy and strategy of risk management implementation.

In its realization, the risk management information system owned by Bank measures all types of risk, especially because of ANZ Banking Group, as the majority shareholder and parent bank, has owned instruments and tools which are sufficient enough for this purpose.

Meanwhile, for market risk and liquidity risk, Bank has implemented the VaR (Value at Risk) method and EaR (Earning at Risk) method to measure and monitor daily market risk, and also an internal model to measure cash requirements for certain periods, namely Short-Term Crisis (STC) and Normal Business Condition (NBC). The STC Model is used to forecast liquidity requirements for the next 8 (eight) days, while the NBC model is used to forecast liquidity requirements for the next one month.

In 2010, Bank has also established a market risk management unit to manage the Bank's market risk.



→ Penghargaan dari Carre-CCSL di tahun 2012 untuk layanan Priority Banking dan Platinum Credit Card. / Award from Carre-CCSL in 2012 for Priority Banking and Platinum Credit Card services.

d) Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Di samping itu, keberadaan SPI juga dipercaya untuk dapat digunakan sebagai sarana dari manajemen Bank untuk melakukan fungsi kustodian atas aset Bank, memastikan tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

d) Internal Controlling System

An effective Internal Control System (ICS) is an important component in the Bank's management and a foundation for the Bank's soundness and safe operational activities. Besides that, the existence of an ICS is expected to be a tool of the Bank's management to conduct a custodial function on the Bank's assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reports, improve compliance towards prevailing regulations and laws, as well as reduce the risks of loss, deviation, and violation of prudential principles.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Bank telah menyusun Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal pada tanggal 18 Agustus 2005.

Pedoman yang dimiliki oleh Bank ini terdiri dari 5 (lima) elemen utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian

Pengawasan oleh manajemen dan kultur Pengendalian diwujudkan dalam bentuk keterlibatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam memberikan persetujuan atas kebijakan dan strategi usaha Bank yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank, persetujuan yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam setiap prosedur dan kebijakan yang disusun oleh masing-masing unit bisnis untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional, serta penyusunan struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas. Proses pemantauan oleh Dewan Komisaris dan Direksi juga turut dilakukan melalui pelaporan temuan hasil audit oleh SKAI yang disampaikan secara berkala kepada Dewan Komisaris, serta penyampaian temuan hasil audit dalam rapat bulanan Dewan Direksi.

Identifikasi dan penilaian risiko telah dilakukan secara teratur oleh semua bisnis unit dengan dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, dengan menyusun *Risk Register* untuk masing-masing unit bisnis Bank, baik yang berhubungan secara langsung dengan proses menghasilkan pendapatan (perbankan korporasi, treasury, perbankan ritel, kartu kredit dan *trade finance*), maupun unit bisnis yang menjalankan fungsi pendukung (misalnya: TI, keuangan dan akunting, *payment service*, *treasury settlement*, sumber daya manusia).

Di dalam *risk register* ini, termuat risiko-risiko yang ada dalam suatu aktivitas bisnis, jenis dan sifat risiko yang dikategorikan berdasarkan kemungkinan terjadinya suatu risiko, efek yang ditimbulkan risiko tersebut bagi aktivitas bisnis Bank, serta sistem pengendalian yang telah ditempatkan untuk menghindari risiko tersebut.

Pada akhirnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko berdasarkan *risk register* tersebut akan menentukan prosedur pengecekan yang dilakukan secara berkala atas sistem pengendalian untuk memastikan efektivitas sistem tersebut.

Referring to the Bank Indonesia stipulation, Bank has established Standard Guidelines of Internal Control System on 18 August 2005.

The guidelines owned by the Bank are composed of 5 (five) basic elements related one to another, which are:

1. Management Oversight and Control Culture

Management oversight and control culture is implemented in the form of participation from the Board of Commissioners and the Board of Directors in the approval of policy and strategy of Bank's business documented in the the Bank's Business Plan, approvals given by the Board of Commissioners and the Board of Directors in every procedure and policy made by each business unit are needed to ensure efficiency and effectiveness of operational activities, and also establishing an organization structure that reflects authorities, responsibilities and clear reporting lines. The supervision process conducted by the Board of Commissioners and the Board of Directors is also made through monitoring of audit result findings by Internal Audit Unit reported on a regular basis to the Board of Commissioners, and the report of audit result findings in monthly Director's meetings.

Risk identification and assessment are done regularly by all business units with the assistance from Risk Management Unit, through the establishment of Risk Register for each business unit, both for units which are directly connected with an income generating process (corporate banking, treasury, retail banking, credit card and trade finance), and also supporting services business units (such as: IT, finance and accounting, payment service, treasury settlement, human resources).

In this risk register, risks are listed according to each business activity, type and characters of risk are categorized based on the probability of occurrence of such risk or the effects caused by such risk to the Bank's business activity and control system that has been placed to prevent that risk.

In the end, based on the risk register, the Risk Management Unit will determine the checking procedure to be done periodically in line with internal control systems to ensure the effectiveness of the system.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Bank melalui masing-masing unit bisnis dengan bantuan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah mengidentifikasi kegiatan pengendalian untuk masing-masing aktivitas bisnis yang rentan terhadap adanya risiko.

Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis Bank diharuskan untuk menerapkan dan memperhatikan kegiatan pengendalian dengan adanya kebijakan dan prosedur yang harus diimplementasikan. Kaji ulang atas efektivitas kegiatan pengendalian ini dilakukan secara berkala oleh SKAI, dengan melakukan pemeriksaan atas penilaian risiko (laporan profil risiko serta *risk register*) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Pemisahan fungsi, yang merupakan satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pengendalian, telah disadari oleh Bank dengan menetapkan struktur organisasi yang memadai untuk mengakomodasi hal ini. Sebagai contoh, terdapat pemisahan fungsi antara *treasury dealing room* (sebagai pihak yang melakukan inisiasi transaksi) dengan *treasury settlement* (sebagai pihak yang melakukan pembayaran transaksi), atau *relationship manager corporate banking* (pihak yang berhubungan langsung dengan calon debitur) dengan *credit analyst* (pihak yang berwenang melakukan analisa untuk pengambilan keputusan kredit) dan *loan administrator* (pihak yang berwenang untuk melakukan pengucuran dana). Hal yang sama juga berlaku untuk SKAI dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sebagai satuan kerja yang bertugas untuk melakukan pemantauan sistem/kegiatan pengendalian di masing-masing unit bisnis, satuan kerja tersebut terpisah dan independen dari unit atau kegiatan operasional.

Pemisahan fungsi ini dimaksudkan agar setiap karyawan dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Prinsip pemisahan fungsi ini juga dikenal sebagai "*Four-Eyes Principle*". Sistem Pengendalian Internal yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan menghindari

2. Risk Identification and Assessment

As mentioned before, the Bank through each business unit with assistance from the Risk Management Unit has identified the activities of each business activity which are susceptible to risks.

All parties who participate in the Bank's business activities are obliged to implement and pay attention on how to control those risks in accordance with the existing policy and procedures. Review on the effectiveness of the control is done periodically by Internal Audit Unit, through the examination of the risk assessment (risk profile report and risk register) established by the Risk Management Unit.

3. Control Activities and Segregation of Duties

Segregation of duties, a component that cannot be separated from control activities, has been duly recognized by the Bank by setting up an adequate organization structure to accommodate this need. As an example, there is a segregation of duty between treasury dealing room (as a party that initiates the transaction) with treasury settlement (as a party that executes the payment), or relationship manager corporate banking (as the party that deal directly with a potential client) with credit analyst (a party that analyze the credit worthiness of the client) and loan administrator (a party that executes the loan draw down). The same thing also prevails for Internal Audit Unit and the Risk Management Unit, as a unit that responsible for system monitoring/controlling activity on each business unit, which are separate and independent from business units or operational activities.

This segregation of duties is intended to eliminate the possibility to make and hide mistakes or violations of duties at all organizational levels as well as operational activities. This function of segregation principle is also known as the "*Four-Eyes Principle*". The internal control system effectiveness requires function segregation and avoids the assignment of authority and responsibility that may lead to various conflicts of interests. All aspects that can lead to conflicts

pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut harus diidentifikasi, diminimalisasi/dieliminsi, dan dipantau secara hati-hati.

4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar-menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Bank telah berupaya untuk menyusun sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Divisi Keuangan dan Akuntansi berkewajiban untuk mengirimkan posisi neraca Bank setiap hari kepada pihak-pihak yang berkepentingan, lengkap dengan rasio-rasio likuiditas, modal, dan kepatuhan yang harus dipelihara oleh Bank.

Salah satu bentuk sistem informasi dan komunikasi juga dikembangkan dengan adanya sistem pemantauan media secara harian, baik media cetak maupun media elektronik, yang digunakan sebagai sarana untuk memantau pemberitaan positif dan negatif tentang Bank. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang kiranya perlu, dapat segera diambil untuk mencegah timbulnya citra negatif.

Bank juga memiliki sistem informasi terintegrasi dengan adanya situs MAX yang disediakan oleh ANZ Group untuk semua kantor cabang maupun anak perusahaannya, termasuk Bank. Sistem informasi ini berisi tentang kabar-kabar terbaru mengenai kondisi industri perbankan global, kebijakan dan prosedur, strategi bisnis, dan kondisi terkini dari ANZ Group.

Bank telah menyusun *Business Contingency Plan* (BCP) yang merupakan pedoman yang dapat digunakan oleh Bank untuk mengatasi kondisi darurat yang disebabkan oleh hal-hal yang tak terduga, seperti misalnya kebakaran dan bencana alam. Sebagai bagian dari BCP, Bank memiliki *Disaster Recovery Plan* (DRP), untuk menjaga agar informasi dan sistem yang dimiliki oleh Bank tetap dapat berfungsi dengan baik

of interests have to be identified, minimized or eliminated, and monitored carefully.

4. Accounting, Information and Communication System

The adequacy of an accounting, information and communication system is intended to identify problems that might appear and be used as a tool of information exchange in conducting duties according to each and every responsibility.

Bank has managed to establish an adequate accounting, information and communication system to achieve the goals mentioned above. The Finance and Accounting Division is responsible to deliver Bank's balance position in daily basis to all related stakeholders, complete with liquidity, capital and compliance ratios that have to be maintained by the Bank.

A robust information and communication system has also been developed through the daily monitoring of both printed and electronic media, which are also used as tools to monitor positive and negative news about the Bank. This is done to ensure that all the necessary actions can be implemented promptly to prevent negative sentiments from arising.

Bank also has an integrated information system called MAX which is a site provided by the ANZ Group for all branch offices and subsidiaries, including the Bank. This information system consists of all updated news concerning conditions in the global banking industry, policies and procedures, business strategy, and current condition of the ANZ Group.

The Bank has established a Business Contingency Plan (BCP), which is a guideline that can be used by the Bank to handle emergency conditions which can be caused by fire or natural disasters. As a part of the BCP, the Bank has compiled a Disaster Recovery Plan (DRP), to keep all information and system of the Bank working well during the process of recovery after the an emergency. The procedure and process of

selama proses pemulihan, setelah terjadinya kondisi darurat. Prosedur dan proses dari BCP ini telah didokumentasikan dan dimintakan persetujuannya kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank, serta dinilai kembali efektivitasnya secara berkala. Untuk memastikan bahwa seluruh rencana dan proses pemulihan darurat dapat berjalan secara efektif, maka pelaksanaan proses dan sistem tersebut diuji secara berkala (dua kali dalam setahun). Bank mendokumentasikan pelaksanaan pengujian berkala tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada ANZ Group, untuk dilakukan penilaian dan langkah perbaikan yang diperlukan.

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan

Bank melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama Bank diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), maupun oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

this BCP was documented and approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Bank and its effectiveness are assessed periodically. To ensure that all plans and processes of emergency recovery can run effectively, the execution of the process and system are tested periodically (twice a year). The Bank documents the implementation of the periodic assessment, and delivers the result to the ANZ Group, which will assess and determine any corrective actions that need to be taken.

5. Monitoring Activities and Correcting Deficiencies

The Bank conducts monitoring activities and continuously corrects deficiencies which affects the effectiveness of the Bank's internal control. Monitoring of the Bank's main risks is prioritized and works as part of the Bank's daily activities, including periodic evaluation, both by all operational units, Risk Management Unit and also by Internal Audit Unit.

Hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Audit Internal akan memberikan rekomendasi dan tindakan koreksi yang harus diambil untuk memastikan efektivitas pengendalian. Hasil ini juga akan disampaikan oleh kedua satuan kerja tersebut di atas melalui rapat bulanan Dewan Direksi, rapat Komite Manajemen Risiko, serta penyampaian laporan tertulis kepada Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan untuk melibatkan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam melakukan fungsi pemantauan.

The result of monitoring done by the Risk Management Unit and the Internal Audit Unit will include recommendation and corrective actions that need to be taken to ensure control effectiveness. This result is also delivered by both business units through the Board of Directors monthly meeting, Risk Management Committee meeting, whilst a written report is also submitted to the Board of Commissioners. This is done to involve the Board of Commissioners and the Board of Directors in conducting their monitoring functions.

Terkait dengan manajemen risiko reputasi, Bank menyadari bahwa kepuasan nasabah adalah esensial untuk menopang pertumbuhan usaha Bank. Oleh karenanya, setiap keluhan dan pengaduan nasabah ditanggapi dengan serius dan ditindaklanjuti oleh Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan internal Bank.

Related to reputation risk management, the Bank realizes that customer satisfaction is essential to sustain the growth of the Bank's business. Therefore, all customer complaints are taken seriously and acted upon by the Bank in accordance with Bank Indonesia and the Bank's internal regulations.

Bank telah memiliki prosedur tata kelola yang berjalan dengan baik untuk mengelola keluhan dan pengaduan nasabah. Unit organisasi yang didekasikan untuk mengelola keluhan dan pengaduan nasabah adalah Unit *Customer Care*. Bank juga menginformasikan kepada seluruh nasabah mengenai infrastruktur Bank yang dapat digunakan oleh nasabah untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan, yaitu dengan cara mendatangi secara langsung kantor cabang Bank pada jam kerja, melalui Relationship Manager, penyampaian secara tertulis melalui faksimili, surat elektronik, *homepage* Bank, serta melalui saluran telepon khusus. Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi juga berjalan dengan baik, masing-masing melalui organ Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, dimana keluhan dan pengaduan nasabah menjadi salah satu topik bahasan dalam pertemuan komite-komite tersebut.

Bank has governance procedures in place to manage customer complaints. The organizational unit dedicated to managing customer complaints is the Customer Care Unit. Bank also informs all customers about Bank's infrastructure that can be used by customers to lodge a complaint, such as directly visiting the Bank's branch offices during business hours, through the Relationship Manager, submission in writing via fax, mail or homepage of the Bank, as well as through a special telephone line. Supervisory functions of the Board of Commissioners and Board of Directors are also operating well, each through the Risk Oversight Committee and Risk Management Committee, respectively in which customer complaints is a topic of discussion in the meetings of these committees.

Bank telah menetapkan kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan nasabah dengan Perjanjian Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) yang ditetapkan dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia.

Bank has established policies and procedures for settlement of customer complaints with Service Level Agreements guided by regulations.

Bank juga memiliki sistem untuk mencatat, memonitor dan menghasilkan laporan pengaduan dan keluhan nasabah.

Bank also has a system to record, monitor and generate reports on customer complaints.

Jumlah keluhan nasabah dimonitor oleh manajemen dan dianalisa untuk dapat memperoleh perbaikan proses atau sistem untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Sebagai contoh, Bank memperkenalkan layanan *electronic statement* untuk memitigasi pengaduan dan keluhan terkait dengan lembar tagihan yang terlambat diterima oleh nasabah.

The number of customer complaints are monitored and analyzed by management in order to ensure process and system improvement further enhancing customer satisfaction. For example, Bank introduced electronic statement services to mitigate complaints from customers related to the delay of customer billing statement receipt.

Pada tahun 2012, Bank menerima 15,890 pengaduan dan keluhan, dimana menunjukkan penurunan dibandingkan 16,512 pengaduan dan keluhan selama tahun 2011.

In 2012, Bank received 15.890 complaints and grievances, which shows reduction compared to 16.512 complaints during 2011.

→ Prosedur tata kelola berjalan baik untuk mengelola penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah. / Governance procedures are in place to manage resolution of customer complaints.



Sebagai bukti keberhasilan manajemen dalam meningkatkan layanan kepada nasabah, Bank berhasil memperoleh penghargaan 2013 *Service-to-Care Award* dari MarkPlus Insight dan majalah *Marketeers*. Bank juga memperoleh penghargaan untuk *Excellence in Regular Credit Card, Platinum Credit Card, Banking dan E-mail Services* di tahun 2013 dari Carre-CCSL (Carre Center for Customer Satisfaction and Loyalty). Bank juga memenangkan penghargaan dari Carre-CCSL di tahun 2012 untuk layanan *Priority Banking dan Platinum Credit Card*.

As evidence of the success of management in improving service to customers, Bank successfully obtained an award in 2013 *Service-to-Care Award* from MarkPlus Insight and *Marketeers Magazine*. Bank also received an award for *Excellence in Regular Credit Card, Platinum Credit Card, Banking and E-mail Services* in the year 2013 from Carre-CCSL (Carre Center for Customer Satisfaction and Loyalty). The Bank also won the award of Carre-CCSL in 2012 for *Priority Banking service and Platinum Credit Card*.

5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/grup inti per posisi laporan adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

5. Lending Exposure to Related Party and Large Lending Exposure

The total lending exposure to related parties and core debtors/group per report position is listed in the table below:

Penyediaan Dana/ Funding Exposure	Jumlah/Total	
	Debitur/Debtor	Nominal/Nominal (dalam jutaan Rp/in IDR million)
Pihak Terkait/ <i>Related Parties</i>	46	29.117,19
Debitur Inti/ <i>Core Debtor</i>		
a. Individu/ <i>Individual</i>	27	5.308.496,98
b. Grup/ <i>Group</i>	23	6.418.769,85
Jumlah/Total	96	11.727.266,83

Terkait dengan penyediaan dana atau penyaluran kredit ke debitur besar atau debitur tertentu, hal ini sesuai dengan karakteristik Bank sebagai bank campuran dan fokus Bank untuk menyediakan dana atau menyalurkan kredit ke nasabah korporasi.

Associated with lending to certain debtors or large debtors, this is in accordance with the Bank's characteristic as a joint venture bank and Bank's focus to provide lending to corporate customers.

Namun demikian, Bank tetap mengedepankan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran kredit dengan bertindak selektif untuk memilih debitur, dimana hanya debitur dan kelompok debitur tertentu pada bidang usaha tertentu yang memenuhi *risk appetite Bank* yang akan dapat menjadi debitur Bank.

However, the Bank maintains the prudential principle in lending by acting diligently in debtor selection, in which only debtors and certain group of debtors in certain sectors meeting the Bank's risk appetite that will be able to be Bank's debtor.

Saat ini, terdapat penyaluran kredit dalam jumlah besar yang melebihi batas maksimum pemberian kredit yang didukung dengan *stand by letter of credit* (SBLC) dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Bank telah memperhatikan dan terus menjalankan petunjuk Bank Indonesia bahwa dukungan SBLC tersebut hanya tetap dilakukan kepada nasabah yang sebelumnya telah berada dalam pengaturan tersebut.

Currently, there are loans in large amount exceeding the legal lending limit that are supported by standby letter of credit (SBLC) and in compliance with Bank Indonesia regulations. Bank has paid attention and keep following Bank Indonesia guidance that the SBLC support only applied to customers who have previously been in such arrangement.



Manajemen Bank berkeyakinan bahwa dengan terus meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan Bank, maka proporsi kredit yang didukung oleh SBLC tersebut akan semakin mengecil.

Manajemen juga berkeyakinan bahwa modal Bank saat ini pada tingkat yang tepat dan efisien guna mendukung pertumbuhan bisnis Bank, serta telah sesuai dengan target kisaran Bank antara 12% - 14%.

Namun demikian, jika terdapat kebutuhan tambahan modal, maka manajemen Bank akan mengajukannya kepada para pemegang saham.

Indonesia merupakan salah satu pasar kunci di Asia yang mendukung ANZ Group mewujudkan aspirasinya menjadi Super Regional Bank. Sehingga, ANZ Group memiliki komitmen untuk terus menumbuhkan bisnisnya di Indonesia. Panin Bank selaku pemegang saham minoritas merupakan bank terbesar ke-6 di Indonesia juga memiliki komitmen untuk mendukung pertumbuhan bisnis Bank.

6. Rencana Strategik Bank

ANZ Indonesia memposisikan diri sebagai bank campuran terkemuka dengan area utama pada perbankan korporasi dan ritel, termasuk kartu kredit dan pinjaman personal. ANZ Group adalah salah satu bank yang terkemuka di dunia pada bidang sumber daya alam dengan kapabilitas yang kuat dalam pertambangan, agribisnis, infrastruktur dan perbankan komersial domestik dengan rangkaian produk yang lengkap, mencakup produk pinjaman, *trade finance*, manajemen kas dan treasuri. Untuk perbankan ritel, ANZ Indonesia akan mengarah menjadi yang terkemuka di pasar dalam bisnis perbankan dengan orientasi pada pelayanan kepada nasabah dan berfokus di *wealth management*, perbankan personal dan kartu kredit.

Filosofi kami adalah mengutamakan hubungan jangka panjang dengan nasabah kami daripada pendekatan yang hanya berorientasi pada transaksi. Kami berkeyakinan bahwa pendekatan yang mengutamakan hubungan dengan nasabah adalah pendekatan yang paling berkesinambungan dalam menambah nilai bagi nasabah kami.

Sebagai bagian dari akuisisi bisnis tertentu the Royal Bank of Scotland/RBS (eks ABN Amro Bank), pada Juni 2010 Bank mulai memiliki unit bisnis perbankan komersial.

The Bank's management believes that with the increasing number of loans, the proportion of the said loans supported with SBLC will gradually decrease.

Management also believes that the current bank capital is at a level appropriate and efficient to support the business growth of the Bank, as well as in accordance with the Bank's targeted range of between 12% - 14%.

However, if there is a need for additional capital, the Bank's management will propose additional capital injection to the shareholders.

Indonesia is one of the key markets in Asia which supports the ANZ Group to realize its aspirations to become a Super Regional Bank. Therefore, ANZ Group has a commitment to continue growing its business in Indonesia. Panin Bank as the minority shareholder of the Bank is the 6th largest bank in Indonesia and also has a commitment to support the growth of the Bank's business.

6. The Bank's Strategic Plan

ANZ Indonesia is positioning itself as one of the market's leading joint-venture banks in the core areas of Corporate Banking and Retail Banking, including Credit Cards and Personal Loans. ANZ Group is one of the world's leading natural resources banks with strong capabilities in mining, commercial agriculture, infrastructure and domestic commercial banking with the full range of lending, trade finance, cash management and treasury products. In retail banking, ANZ in Indonesia will have a market leading client service oriented business with a focus on *wealth management*, personal banking and credit cards.

Our philosophy is to build long-term relationships with our clients rather than a transaction-oriented approach. We strongly believe that a relationship-oriented approach is the most sustainable approach to adding value to our clients.

As part of the acquisition of certain businesses of the Royal Bank of Scotland / RBS (former ABN Amro Bank), in June 2010, the Bank began to have a commercial banking business unit.

Sesuai arahan Bank Indonesia dan komitmen Bank untuk mendukung peranan industri perbankan dalam pembangunan perekonomian Indonesia, maka Bank mendukung pengembangan sektor UKM dengan mulai meluncurkan kembali kredit ke nasabah segmen tertentu yang memenuhi definisi sektor UKM Bank Indonesia sesuai dengan keahlian dan *risk appetite* Bank pada Oktober 2012.

Dalam mengucurkan kredit ke sektor UKM, Bank juga mengembangkan infrastruktur pendukung, termasuk di antaranya adalah pemberdayaan kantor cabang dalam pemasaran, penilaian dan pemutusan kredit, serta pemeliharaan dokumen kredit dan pengawasan kinerja kredit ke sektor UKM tersebut.

Target tahun 2013 yang ditetapkan oleh Bank antara lain adalah:

- Menjaga tingkat CAR pada level 13,03 – 13,50%.
- Peningkatan aset produktif sebesar 21%.
- Rasio kredit yang diberikan terhadap aset produktif Bank diproyeksikan sebesar 80,53%.
- Pertumbuhan kredit perdagangan diproyeksikan akan meningkat sejumlah 41% sedangkan kredit non perdagangan diproyeksikan akan meningkat sejumlah 31%.

As directed by Bank Indonesia and the Bank's commitment to support the role of the banking industry in the development of the Indonesian economy, the Bank supports the development of the SME sector by re-launching credit to customers at certain segments that meets Bank Indonesia definition of the SME sector, in accordance with the Bank's expertise and risk appetite, in October 2012.

In providing lending to the SME sector, Bank is also developing supporting infrastructure, including empowerment of branch offices in marketing, appraisal and loan approval, as well as maintenance of loan documents and monitoring the credit performance of the SME sector.

The targets set by the Bank in 2013, among others, are:

- Maintaining the CAR level at 13.03 – 13.50%.
- Increase productive assets by 21%.
- Ratio of loans to Bank's productive assets is projected at 80,53%.
- Growth of trade loan is projected to increase by 41% whilst non-trade loans are projected to increase by 31%.

→ Komitmen Bank dalam mendukung pengembangan sektor UKM. / Bank commitment to support the development of SME sector.



7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank yang belum Diungkap dalam Laporan Lainnya.

Terkait dengan adanya perubahan komposisi pemegang saham dan perubahan struktur modal Bank, Bank telah menatausahakan pergantian nama dari PT ANZ Panin Bank menjadi PT Bank ANZ Indonesia, yang mana telah disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia tertanggal 29 Desember 2011.

Bank mengubah nama menjadi PT Bank ANZ Indonesia secara efektif pada 12 Januari 2012 dan mempublikasikan perihal perubahan nama tersebut kepada publik melalui media massa serta melaporkannya ke Bank Indonesia pada tanggal yang sama.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada tanggal 11 Oktober 2007, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Bank adalah sebesar Rp. 6,517 miliar. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Bank telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut ke kantor pelayanan pajak melalui surat tertanggal 28 Desember 2007. Pada tanggal 15 Desember 2008, kantor pelayanan pajak telah menerbitkan surat keputusan atas permohonan keberatan yang disampaikan oleh bank, dimana pihak kantor pelayanan pajak menolak keseluruhan keberatan yang disampaikan oleh Bank. Selanjutnya, atas hasil keputusan keberatan tersebut, Bank mengajukan banding pada tanggal 12 Maret 2009 ke Pengadilan Pajak, dimana menurut Bank jumlah pajak kurang bayar yang seharusnya adalah sebesar Rp. 157 juta. Berdasarkan hasil keputusan banding tertanggal 27 Januari 2011, yang dibacakan pada tanggal 5 Januari 2011, Pengadilan Pajak telah mengabulkan hampir seluruh permohonan yang disampaikan oleh Bank. Berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak tersebut, Bank telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak beserta imbalan bunga sebesar Rp. 9,254 miliar.

7. The Transparency of Financial and Non-Financial Condition which have not been Disclosed in Other Reports.

With respect to the changes in the composition of shareholders and the Bank's capital structure, the Bank has administrated a name change from PT ANZ Panin Bank to PT Bank ANZ Indonesia, which has been approved by the Governor of Bank Indonesia on 29 December 2011.

Bank has effectively changed its name to PT Bank ANZ Indonesia on 12 January 2012 and published the name change to the public through the mass media also reported to Bank Indonesia on the same date.

Based on tax audit for fiscal year 2004 result issued by the Tax Office of Foreign Capital Investment V, Bank had received the Tax Underpayment Assessment Letter on 11 October 2007, which stated that total tax underpayment to be paid by the Bank was amounting to IDR 6.517 billion. The Bank has submitted an objection letter on the Tax Underpayment Assessment Letter to Tax Office of Foreign Capital Investment V through a letter dated 28 December 2007. On 15 December 2008, the Tax Office issued tax objection decree, where the Tax Office rejected the objection request by the Bank. Subsequently, for the result of the decision regarding the objection, the Bank had submitted an appeal on 12 March 2009 to the Tax Court, whereby according to the Bank the amount of Tax Underpayment should be IDR 157 million. Based on the verdict of the appeal dated 27 January 2011, read on 5 January 2011, the Tax Court granted almost all the requests submitted by the Bank. Based on the decree of the Tax Court, the Bank has received the return of tax overpayment plus interests amounting to IDR 9.254 billion.

Pada bulan Juni 2011, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar (SKPLB) atas pemeriksaan pajaktahun pajak 2009. Pemeriksaan pajaktahun pajak 2009 dilakukan karena Bank mempunyai kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 sebesar Rp. 44,7 miliar. Atas hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V tersebut, Bank telah mengajukan keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V melalui surat keberatan tertanggal 20 September 2011 yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V pada tanggal 22 September 2011.

Pada tanggal 18 September 2012, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu menerbitkan surat keputusan keberatan yang menerima sebagian permohonan keberatan yang disampaikan oleh Bank. Kantor pelayanan pajak telah menerima permohonan keberatan atas pajak penghasilan badan sebesar Rp. 41,5 miliar. Atas keputusan keberatan PPh Pasal 23 dan PPh final, Bank mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Pada saat ini proses permohonan banding sedang berlangsung.

Tax Office of Foreign Capital Investment V issued a Tax Underpayment Assessment Letter and Tax Overpayment Assessment Letter for the tax assessment for fiscal year 2009. The tax audit for fiscal year 2009 was conducted due to tax overpayment by the Bank for income tax in Article 25 of IDR 44.7 billion. For the assessment result issued by Tax Office of Foreign Capital Investment V, the Bank had submitted an objection letter to the Taxation Tax Office of Foreign Capital Investment V through an objection letter dated 20 September 2011 that was submitted to the Tax Office of Foreign Capital Investment V on 22 September 2011.

On 18 September 2012, Large Taxpayer Office I issued tax objection assessments which partially accepted our tax objection request. The tax office as approved the Bank's tax objection request of IDR 41.4 billion. For remaining tax objection assessments, the Bank is requesting for tax appeal to the Tax Court. Currently, the tax appeal process is still ongoing.

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank dengan kepemilikan saham lebih dari 5% atas Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lainnya, baik yang berlokasi di luar negeri maupun dalam negeri. Rincian atas hal tersebut adalah sebagai berikut:

B. Share Ownership by Members of Board of Commissioners and Board of Directors

The members of the Board of Commissioners and the Board of Directors do not have shares of more than 5% on behalf of the Bank, other banks, non-bank financial institution, or other companies, located both overseas or locally. The details are as follows:

No/ No	Nama/Name	Kepemilikan saham yang lebih dari 5% / >5% ownership of shares							
		A		B		C		D	
		I	L	I	L	I	L	I	L
1	Enrique V Bernardo	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bill Foo Say Mui	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jusuf Arbianto Tjondrolukito	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Anies Rasyid Baswedan ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Joseph Abraham	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ajay Surendra Mathur	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ngo Jerry Go ²	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Muhamadian Rostian	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Martin Mulwanto	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Soewandy	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Luskito Hambali	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Pengangkatan Anies Rasyid Baswedan sebagai Komisaris Independen Bank disetujui oleh Bank Indonesia melalui surat Gubernur Bank Indonesia tertanggal 3 September 2012.

² Per tanggal 12 Maret 2012, Ngo Jerry Go mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur *Institutional Banking* yang disetujui melalui Sirkular Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank ANZ Indonesia tertanggal 18 Juni 2012.

¹ Appointment of Anies Rasyid Baswedan as Independent Commissioner of the Bank is approved by Bank Indonesia through the Governor of Bank Indonesia letter dated 3 September 2012.

² As of March 12, 2012, Ngo Jerry Go resigned from the post of Director of Institutional Banking which was approved in the Resolution Circular of PT Bank ANZ Indonesia Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 18, 2012.

Catatan/Notes :

- A : PT Bank ANZ Indonesia/ PT Bank ANZ Indonesia
 B : Bank lain/other banks
 C : Lembaga Keuangan Bukan Bank/non-bank financial institution
 D : Perusahaan lainnya/other companies
 I : Indonesia/Indonesia
 L : Luar negeri/Abroad

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Dewan Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tidak saling memiliki baik hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi syarat minimum 50% komisaris adalah independen. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) serta kesetaraan di antara berbagai kepentingan. Selaku Komisaris Independen dan Pihak Independen, mereka harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

C. Financial and Family Relationships among Members of Board of Commissioners and Board of Directors with Other Members and/or with Controlling Shareholders

All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners do not have any financial or family relationships among members of the Board of Directors and/or among members of the Board of Commissioners.

In addition, composition of the Board of Commissioners has met the minimum requirement of at least 50% commissioner must be independent. The presence of Independent Commissioners is intended to create an objective and fair working environment and equality among various interests. As Independent Commissioners and Independent Parties, they are less likely to have and must be free of conflict of interest.

D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

D. Remuneration and Other Facilities Package/Policy for Board of Commissioners and Board of Directors

Remuneration and other facilities package/policy for Board of Commissioners and Directors is as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain/ Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam Satu Tahun/Total Amount Received in One Year			
	Dewan Komisaris/Board of Commissioners		Dewan Komisaris/Board of Commissioners	
	Orang/ Person	Jutaan Rupiah/ in million Rupiah	Orang/ Person	Jutaan Rupiah/ in million Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) / Remuneration (salary, bonus, routine allowances, tantiem and other facilities in the form of non in kind)	4	1,153	6	23,599
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) dalam ekuivalen Rupiah / Other facilities in the form of in kind (housing, transportation, medical insurance etc.) in Rupiah equivalent which:	-	-	-	-
a. dapat dimiliki/can be owned	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki/ can not be owned				
- perumahan/residence			2	1,777
- transportasi/transportation			6	1,132
- asuransi/insurance			6	262
Jumlah/Total	4	1,153	6	26,770

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, adalah sebagai berikut:

The number of members of Board of Commissioners and Board of Directors who get remuneration package in a year are grouped in range of income, as follows:

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai/ Total annual cash remuneration per person	Jumlah Direksi/ Total Directors	Jumlah Komisaris/ Total Commissioners
Di atas Rp 2 miliar/Above IDR 2 billion	2 orang	-
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar/ Above IDR 1 billion up to IDR 2 billion	3 orang	-
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar/ Above IDR 500 million up to IDR 1 billion	-	-
Di bawah Rp 500 juta/Below IDR 500 million	-	4 orang

E. Opsi Saham

Tidak terdapat *shares option* yang diberikan oleh Bank kepada anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi maupun Pejabat Eksekutif Bank.

E. Shares Option

There is no shares option given to members of Board of Commissioners and the Board of Directors as well as Bank's Executive Officers.

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah dengan pembandingan yang diterima per bulan adalah sebagai berikut:

1. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 254.84 : 1
2. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 4.95 : 1
3. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 3.4 : 1
4. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1.16 : 1

F. The Highest and Lowest Salary Ratios

The highest and lowest salary ratios with allowance as the standard of comparison taken each month is as follows:

1. the ratio of highest and lowest employee salary is 254.84 : 1
2. the ratio of highest and lowest director salary is 4.95 : 1
3. the ratio highest and lowest Commissioner salary is 3.4 : 1
4. the ratio of highest salary Director and highest salary employee is 1.16 : 1

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2012, Dewan Komisaris mengadakan 5 (lima) rapat dengan rincian dan kehadiran Komisaris sebagai berikut:

No/No	Nama/Name	Rapat/Meeting I 12 January 2012	Rapat/Meeting II 12 March 2012	Rapat/Meeting III 26 June 2012	Rapat/Meeting IV 5 September 2012	Rapat/Meeting V 28 November 2012	Kehadiran/Attendance
1	Enrique V Bernardo	Hadir/Attend	Hadir/Attend	Hadir/Attend	Hadir/Attend	Hadir/Attend	100%
2	Bill Foo Say Mui	Hadir/Attend	Hadir/Attend	Hadir/Attend	Hadir/Attend (Teleconference)	Hadir/Attend (Teleconference)	100%
3	Jusuf Arbianto Tjondrolukito	Hadir/Attend	Hadir/Attend	Hadir/Attend	Hadir/Attend	Hadir/Attend	100%
4	Anies Rasyid Baswedan					Hadir/Attend	100% ¹

¹ Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Anies Rasyid Baswedan sebagai Komisaris Independen Bank melalui surat Gubernur Bank Indonesia tertanggal 3 September 2012.

¹ Bank Indonesia approved the appointment of Anies Rasyid Baswedan as Independent Commissioner of the Bank through the Bank Indonesia Governor letter dated 3 September 2012.

H. Jumlah Penyimpangan Internal (internal fraud)

Terdapat peningkatan jumlah kasus kecurangan (*fraud*) pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. *Group Investigations* Bank menangani 24 (dua puluh empat) kasus yang merugikan dan atau berpotensi merugikan Bank baik secara keuangan maupun reputasi termasuk di dalamnya adalah tiga kasus yang dilakukan oleh pihak eksternal. *Group Investigations* berhasil memulihkan 99% kerugian keuangan atau sebesar Rp 2,38 miliar dari total kerugian keuangan sebesar Rp 2,40 miliar.

Bank telah menerapkan sistem pencegahan dan pendeteksian aktivitas kecurangan (*fraud*) sebagai bagian strategi *anti-fraud*. Kegiatan *anti-fraud* tersebut meliputi *tone at the top*, memastikan merekrut karyawan yang tepat, pengkomunikasian harapan kejujuran dan integritas, penciptaan lingkungan kerja yang positif dan penanganan transaksi maupun aktivitas *fraud*, kebijakan perlindungan terhadap *whistleblower* serta penerapan konsekuensi yang tegas terhadap pelaku kecurangan. Peningkatan jumlah kasus kecurangan yang berhasil dideteksi dan ditangani dengan baik oleh unit *Group Investigations* merupakan hasil positif dari penerapan strategi *anti-fraud*.

G. The Frequency of Board of Commissioners Meeting

During 2012, The Board of Commissioner held 5 (five) meetings with the details and attendance of Commissioner members as follows:

H. The Number of Internal Fraud

There was an increase in the number of fraud cases in 2012 than in 2011. Bank's Group Investigations handled 24 (twenty four) cases of adverse and potentially adverse for the Bank both financially and reputation, including three cases which are perpetrated by external parties. Group Investigations managed to recover 99% of financial losses or IDR 2.38 billion of the total financial losses of IDR 2.40 billion.

Bank has introduced prevention and detection system of fraudulent activity as part of an anti-fraud strategy. Anti-fraud activities include the tone at the top, ensure to recruit the right employees, communicating expectations on honesty and integrity, creating a positive working environment and handling of fraudulent transactions and activities, whistleblower protection policy and the implementation of strict consequences for fraudsters. An increasing number of fraud cases were detected and treated properly by the Group Investigations unit is a positive result of the implementation of anti-fraud strategy.

Internal Fraud dalam 1 tahun/ Internal Fraud Case in One Year	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh/Total Cases caused by					
	Pengurus/ Management		Pegawai Tetap/ Permanent Employees		Pegawai Tidak Tetap/ Non-Permanent Employees	
	Tahun Sebelumnya/ Previous Year	Tahun Berjalan/ Current Year	Tahun Sebelumnya/ Previous Year	Tahun Berjalan/ Current Year	Tahun Sebelumnya/ Previous Year	Tahun Berjalan/ Current Year
Jumlah Fraud/Total Fraud Cases	-	-	4	11	5	13
Telah diselesaikan/Resolved		-		11		12
Dalam proses penyelesaian internal Bank/In the Process of resolution internally within the Bank	-	-	-	-	-	1
Belum diupayakan penyelesaiannya/Resolution have not been carried out	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum/Pursued legal process		-		-		1

I. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang masih berjalan pada akhir tahun 2012 adalah gugatan yang diajukan oleh seorang nasabah pemegang kartu kredit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada PT Bank ANZ Indonesia sebagai Turut Tergugat I, di mana Penggugat meminta untuk Majelis Hakim memerintahkan PT Bank ANZ Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan perbankan di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 112.984.178 (seratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat seratus tujuh puluh delapan Rupiah), dan membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).

Permasalahan Hukum/ Legal Cases	Perdata/ Civil	Pidana/ Criminal
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)/ Resolved (with firm legal bases)	-	-
Dalam proses penyelesaian/In the process of resolution	1	-
Total	1	-

I. Legal Issues

There was an outstanding lawsuit in the year end 2012 filed by a credit card holder in the Central Jakarta District Court to PT Bank ANZ Indonesia as Co-Defendant I, where the Plaintiff requested that the Panel of Judges ordered to cease the banking operation of PT Bank ANZ Indonesia inside and outside Indonesian territory, pay the material damage in amount of IDR 112.984.178 (one hundred twelve million nine hundred eighty four thousand one hundred seventy eight Rupiah) and pay the immaterial damage in amount of IDR 500.000.000 (five hundred million Rupiah).

J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

ANZ telah memiliki kebijakan mengenai pedoman perilaku yang diterapkan kepada Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan ANZ. Pedoman ini berfungsi sebagai landasan perilaku yang pada akhirnya mencegah terjadinya benturan kepentingan bagi seluruh karyawan ANZ. Kebijakan ini telah disosialisasikan pada saat penerimaan karyawan baru dan juga terdapat dalam Peraturan Perusahaan yang dibagikan ke setiap karyawan.

Selama ini Bank belum pernah menghadapi kondisi yang berhubungan dengan benturan kepentingan.

K. Buyback Shares dan Buyback Obligasi Bank

Bank tidak menerbitkan obligasi dan tidak pernah melakukan kegiatan *buyback shares*.

L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan

Bank tidak pernah terlibat dalam pemberian dana untuk menyokong kegiatan politik.

Sementara itu, untuk kegiatan sosial, selama tahun 2012 Bank melakukan kegiatan sosial sebagai perwujudan dari program tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui kegiatan program edukasi keuangan MoneyMinded dalam bentuk fasilitasi kepada masyarakat yang bekerja-sama dengan sejumlah organisasi nirlaba, antara lain YCAB (Yayasan Cinta Anak Bangsa) dan The Learning Farm, penyaluran dana beasiswa melalui The Learning Farm, sosialisasi program Ayo ke Bank yang ditujukan kepada anak dari karyawan maupun nasabah Bank, dan program sukarelawan yang melibatkan karyawan Bank yang bekerja-sama dengan sejumlah organisasi nirlaba.

J. Transaction that Contains Conflict of Interest

ANZ has made a policy concerning behavior guidelines for all Commissioners, Directors and all employees of ANZ. This guideline is intended to provide guidelines and behavior foundation that will prevent any conflicts of interest for all employees of ANZ. This policy has been socialized when new employees enter the bank and it is also inserted in Company's Regulation booklet given to every employee.

Until now, the Bank has not encountered conflicts of interest issues.

K. Shares Buyback and Bond Buyback of the Bank

The Bank does not issue bonds and never conducts any shares buyback activity.

L. Fund Granting for Social and Political Activities during Reporting Period

The Bank has never been involved in financing any political activity.

Meanwhile, for social activities, during 2012 the Bank performed social activities as a form of corporate social responsibility for the community through the MoneyMinded banking education activities. These were conducted through facilitating activities for the public and in cooperation with non-profit organizations, among others YCAB and The Learning Farm. The programs include scholarships through The Learning Farm, Ayo ke Bank (Come to the Bank) program dissemination for children of Bank employees and customers, as well as volunteer programs for employees in cooperation with non-profit organizations.

Berikut kami sampaikan rincian kegiatan sosial Bank selama tahun 2012: The following are the details of the Bank's social activities during 2012:

Aktivitas CSR 2012/ CSR Activities 2012	Tanggal/Date	Jumlah Donasi (Rupiah)/ Cost (IDR)	Kegiatan CSR/CSR Activities
Program Edukasi Keuangan/ Financial Education Program	Januari - Desember 2012	IDR 300.000.000	Program Edukasi Keuangan melalui MoneyMinded Indonesia dimana sejumlah karyawan ANZ menjadi pengajar di beberapa tempat termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Yayasan Cinta Anak Bangsa - 100 orang peserta • The Learning Farm - 80 orang peserta • Internal ANZ, sebagai bagian dari program pengenalan terhadap Bank - 60 orang peserta/ Financial education program through MoneyMinded Indonesia where a number of ANZ employees teach at a number of locations including: <ul style="list-style-type: none"> • Yayasan Cinta Anak Bangsa (the Cinta Anak Bangsa Foundation) - 100 participants • The Learning Farm - 80 participants • Internally, as part of the Banking Introduction Program - 60 participants
Pelatihan Karyawan untuk menjadi Fasilitator Program Edukasi Keuangan/Employee training to become Financial Education Program facilitators	Januari - Desember 2012	IDR 100.000.000	Pelatihan MoneyMinded melalui Program Edukasi Keuangan terhadap lebih dari 20 karyawan ANZ untuk menjadi fasilitator atau pengajar pelatihan edukasi keuangan ke sejumlah organisasi di masyarakat dan juga ke sesama karyawan ANZ./ MoneyMinded training through the Financial Education Program for more than 20 ANZ employees to become facilitators or teachers for the Financial Education training for community organizations and other ANZ employees.
Mendukung program edukasi informal melalui organisasi the Learning Farm/Supporting informal education programs through the Learning Farm organization	Januari - Desember 2012	IDR 60.000.000	Mendukung program the Learning Farm melalui program anak asuh dimana ANZ berpartisipasi membiayai sejumlah anak putus sekolah hingga mereka lulus program pendidikan di the Learning Farm tersebut./ Supporting the Learning Farm programs through their child fostering programs where ANZ participated in financing a number of children to pass the education program at the Learning Farm.
Program Ayo ke Bank/The Ayo ke Bank (Come to the Bank) program	June 2012	IDR 60.000.000	Program Ayo ke Bank yang ditujukan kepada anak dari karyawan ANZ serta anak dari para nasabah Signature Priority Banking untuk dapat mengenal fungsi dan peranan Bank dengan lebih baik, termasuk di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan fungsi bank • Pengenalan fungsi uang • Cara menabung di bank • Kegunaan menabung • Perencanaan masa depan/ The Ayo ke Bank Program is aimed at children of employees and customers of Signature Priority Banking to know the roles and functions of the Bank better, including: <ul style="list-style-type: none"> • Introduction to Banking • Introduction to Money • How to save in banks • The purpose of savings • Future planning
Program Sukarelawan/ Volunteer Program	November 2012	IDR 100.000.000	Program sukarelawan ANZ dimana karyawan diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan sosial di beberapa organisasi termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Yayasan Cinta Anak Bangsa • Yayasan Mitra Netra • Yayasan KDM (Kampus Diakonia Modern) • Yayasan Lontar • WWF (World Wide Fund for Nature)/ ANZ volunteer program where employees are given the opportunity to conduct social activities in a number of organizations, including: <ul style="list-style-type: none"> • Yayasan Cinta Anak Bangsa (the Cinta Anak Bangsa Foundation) • Yayasan Mitra Netra (the Mitra Netra Foundation) • Yayasan KDM (the Kampus Diakonia Modern Foundation) • Yayasan Lontar (the Lontar Foundation) • WWF (World Wide Fund for Nature)
TOTAL		IDR 620.000.000	

III. AKUNTABILITAS

Untuk menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas ini, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing komponen dalam Bank, sehingga pengelolaan Bank dapat terlaksana secara efektif.

Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ Bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Bank dan menetapkan kompetensi dari organ tersebut sesuai tanggung jawab masing-masing, melalui keberadaan struktur organisasi yang memadai.

Selain adanya aspek akuntabilitas dalam struktur dan mekanisme pelaporan, Bank juga menerapkan akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan serta penanganan Sumber Daya Manusia.

Aspek akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan diwujudkan dengan keberadaan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai sarana bagi Dewan Direksi Bank untuk mempertanggungjawabkan kinerja Bank yang tercermin dalam laporan keuangan Bank. Selain itu, Bank juga menyampaikan laporan keuangan publikasi untuk masyarakat luas dalam surat kabar nasional setiap tiga bulan sekali.

Aspek akuntabilitas dalam penanganan karyawan/SDM dicerminkan melalui penerapan sistem *reward and punishment* yang dikaitkan dengan kebijakan kompensasi.

IV. PERTANGGUNGJAWABAN

Pengelolaan Bank didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank telah memberikan pedoman yang tegas berupa kebijakan umum dalam Peraturan Perusahaan bahwa Bank dan karyawan harus mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang Indonesia dan segala perubahan terhadap undang-undang tersebut setiap saat. Bank juga menciptakan iklim dan budaya kepatuhan dalam kegiatan operasionalnya.

Bank dikelola dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Transaksi nasabah dengan Bank mencerminkan kepercayaan publik terhadap Bank dan Bank menjaga kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab melalui pengelolaan Bank yang sehat, *prudent* dan profesional. Tingkat kesehatan Bank merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian Dewan Direksi dimana hal tersebut diukur secara berkala setiap triwulan. Saat ini tingkat kesehatan Bank berada pada peringkat sangat sehat.

III. ACCOUNTABILITY

In order to uphold the accountability principle, clarity of function execution and responsibility of each component in the Bank are needed, so that the Bank can be managed effectively.

Bank has defined clear responsibilities from every unit of the Bank in accordance with Bank's vision, mission, target market and strategy and also has defined the competency of those unit according to respective responsibility, through the existence of a robust organization structure.

In addition to the existence of accountability aspect in the reporting structure and mechanism, the Bank has also implemented accountability in delivering financial report and human resource handling.

The accountability aspect in delivering financial report is reflected with the existence of General Meeting of Shareholders, as a tool for Board of Directors of the Bank to be responsible for Bank's performance reflected in Bank's financial report. Moreover, the Bank also publish financial report in a national newspaper on quarterly basis.

The accountability aspect in employee/human resource handling is reflected through the implementation of reward and punishment system in line with the employee's compensation policy.

IV. RESPONSIBILITY

Bank's management is fully committed to comply with the prevailing regulations. Bank has provided a clear guideline in a form of Company's Regulation that the Bank and its employees have to comply with all regulations in Indonesia and all amendments of those regulations. Bank also continuously strives to create a compliance culture and environment in its operational activities.

Bank is managed by prioritizing sound banking management and prudential principles above all else. Transactions done by customers in the Bank must reflect trust given by public to the Bank and the Bank must keep that trust with full responsibility by upholding sound, prudent and professional banking management. Bank's soundness rating is one of aspects that have been a focus of the Bank's Board of Directors which is assessed regularly on quarterly basis. Bank's soundness rating is currently at sound rating.

V. INDEPENDENSI

Manajemen Bank menyadari status hukum Bank sebagai entitas hukum berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, oleh karenanya harus menjaga independensi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, termasuk dari pengaruh pemegang saham.

Dalam hal perkreditan, Bank telah memiliki fungsi manajemen risiko kredit dengan prosedur tata kelola yang berjalan dengan baik, termasuk unit manajemen risiko kredit, kebijakan dan prosedur, penetapan limit, pemantauan risiko kredit, audit terhadap perkreditan, serta pelaporan kredit kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam hal keputusan kredit, manajemen telah membentuk Komite Kredit yang berfungsi untuk mengevaluasi dan menyetujui keputusan kredit dalam jumlah besar yang jumlahnya di atas batas pemegang diskresi kredit (*credit authority discretion*) perorangan.

Pengawasan risiko kredit dilakukan oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, masing-masing melalui organ Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantauan Risiko dimana Bank juga telah memiliki sistem informasi yang baik untuk pengukuran, pengawasan dan pelaporan risiko kredit. Risiko kredit diidentifikasi dan dikendalikan salah satunya melalui deteksi secara dini atas kualitas kredit debitur pada semua lini bisnis Bank.

Proses perkreditan telah mencakup pemisahan tugas dan tanggung jawab untuk mencegah adanya kecurangan. Proses perkreditan juga termasuk salah satu area yang diperiksa oleh SKAI, di mana setiap temuan audit ditindaklanjuti dan tindakan perbaikan (*corrective action*) yang dimonitor dengan ketat.

Bank menyadari masih adanya ketergantungan dalam hal teknologi kepada ANZ Group, terutama dalam kaitannya dengan fakta bahwa pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Bank dikelola di pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) milik ANZ Group di Melbourne, Australia. Bank telah memperoleh persetujuan ulang dari Bank Indonesia untuk pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) yang berlokasi di Melbourne, Australia tersebut pada 19 Maret 2010. Namun demikian, dengan telah diterbitkannya PP Nomor 82 Tahun 2012 yang antara lain mewajibkan lokasi pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) untuk berada di dalam negeri, maka saat ini Bank bekerja sama dengan ANZ Group untuk relokasi pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) dari lokasi di Melbourne, Australia ke lokasi di Indonesia. Bank telah mempresentasikan rencana relokasi tersebut kepada Bank Indonesia pada

V. INDEPENDENCY

The Bank's Management realizes the legal status of the Bank as a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, therefore, it must maintain independence in carrying out daily tasks, including from the influence of shareholders.

In terms of lending, the Bank has a credit risk management function with governance procedures that work well, including credit risk management unit, policies and procedures, limits, credit risk monitoring, audit of credit, and credit reporting to the Board of Directors and Board of Commissioners.

For credit approval process, management has established a Credit Committee which serves to evaluate and approve credit in a large amount exceeding the discretion of the the individual credit authority holder.

Credit risk oversight is conducted by the Board of Directors and Board of Commissioners through the Risk Management Committee and the Risk Monitoring Committee, respectively, in which the Bank has a robust information system for measurement, monitoring and reporting of credit risk. Credit risks are identified and controlled through the early detection of credit quality of debtor in all of the Bank's business lines.

Lending process has included separation of duties and responsibilities to prevent any fraud. Lending process is also one of areas examined by the Internal Audit Unit where each audit finding is followed up and its corrective action is also closely monitored.

Bank is aware of the dependency in technology to ANZ Group, particularly in relation to the fact that the data center and disaster recovery center of the Bank is managed in a data center and disaster recovery center owned by ANZ Group in Melbourne, Australia. Bank has obtained re-approval from Bank Indonesia for the data center and disaster recovery center located in Melbourne, Australia on March 19, 2010. However, with the issuance of Government Regulation No. 82 of 2012 which among others things requires that the data center and the disaster recovery center to be located in an onshore site, Bank is currently working with ANZ Group for the relocation of the data center and the disaster recovery center currently located in Melbourne, Australia to locations in Indonesia. Bank has presented the relocation plan to Bank Indonesia in March 2013 and will provide a more detailed plan in June 2013.

Maret 2013 dan akan memberikan rencana yang lebih terperinci pada Juni 2013.

Sehubungan dengan lokasi pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Bank di lokasi milik dan dikelola oleh ANZ Group di Melbourne, Australia tersebut, maka Bank dibebankan *intra-group charges* oleh ANZ Group. Pada 24 Oktober 2011, Bank Indonesia telah meminta Bank untuk menghentikan pencatatan dan pembayaran atas pembebanan *intra-group charges* tersebut untuk tahun 2011 dan periode berikutnya jika tidak disertai dengan dokumen pendukung dan/atau detil kontrak atas pembebanan biaya dimaksud dan Bank mematuhi. Bank telah membentuk *Steering Committee* untuk membahas pembebanan *intra-group charges* termasuk penelaahan atas kelengkapan dokumen pendukung serta pembahasan atas biaya yang timbul. Bank telah menyampaikan dokumen pendukung *intra-group charges* tahun 2012 kepada Bank Indonesia untuk penelaahan dan persetujuan. Bank Indonesia saat ini masih memproses permohonan persetujuan pembebanan dan pembayaran *intra-group charges* tahun 2012 tersebut. Termasuk dalam proses tersebut, Bank menunjuk PT Deloitte Konsultan Indonesia selaku pihak ketiga independen untuk melakukan kajian atas *intra-group charges* tersebut.

Relokasi pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) dari luar negeri ke Indonesia merupakan bagian dari *Technology Roadmap* yang saat ini masih dalam proses implementasi oleh Bank. Hal lain yang tercakup dalam *Technology Roadmap* adalah penambahan sumber daya manusia (SDM) ataupun tenaga ahli Teknologi Informasi serta sertifikasi tenaga ahli Teknologi Informasi Bank, yang ditujukan untuk meningkatkan independensi Bank dalam teknologi informasi.

VI. KEWAJARAN

Operasional Bank didasarkan pada prinsip kewajaran dengan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memenuhi hak-hak nasabah sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Bank dan nasabah ketika melakukan transaksi. Bank juga melindungi kepentingan nasabah sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh pemerintah, termasuk dalam hal kerahasiaan nasabah, penyelesaian pengaduan, transparansi informasi produk Bank, informasi debitur, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan lain-lain.

With respect to the location of Bank's data center and disaster recovery center in the location owned and managed by ANZ Group in Melbourne, Australia, Bank is charged with *intra-group charges* by ANZ Group. On October 24, 2011, Bank Indonesia has requested Bank to stop booking and making payment on *intra-group charges* for the year 2011 and the following periods if they are not supported with complete documents and/or detailed agreement on those charges and the Bank has complied with this Bank Indonesia requirements. Bank has established a *Steering Committee* to discuss *intra-group charges* including a review on the supporting documents as well as discussion on the costs incurred. Bank has submitted supporting documents for 2012 *intra-group charges* to Bank Indonesia for review and approval. Bank Indonesia is still processing the approval for recognition and payment of 2012 *intra-group charges*. During the process, Deloitte Consulting was appointed by the Bank as an independent third party to conduct an assessment on the *intra-group charges*.

Relocation of the data center and the disaster recovery center from offshore location to Indonesia is part of the *Technology Roadmap*, which is still in the process of implementation by the Bank. Other matters included in the *Technology Roadmap* is the addition of technology human resources (HR) or Information Technology experts and certified banking Information Technology experts, aimed to increase the independence of the Bank in information technology area.

VI. FAIRNESS

Bank's operation is based on the principle of fairness with justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders in accordance with agreements and prevailing regulations.

Bank fulfils customers' rights according to agreements made by the Bank and customers when they transact. Bank also protects customers' interest according to regulation stipulated by the government, including customer's secrecy, complaint resolution, transparent information on Bank's product, debtor's information, implementation of Know Your Customer principle and others.

Karyawan merupakan salah satu aset terpenting bank dalam memberikan produk dan layanan kepada nasabah, oleh karena itu Bank berkomitmen untuk mengembangkan karyawan agar handal dan mencapai kualitas terbaiknya. Hak dan kewajiban karyawan telah digariskan dalam Peraturan Perusahaan dan surat pengangkatan karyawan. Bank memastikan bahwa hak dan kewajiban tersebut dapat terwujud dengan proporsional dan profesional.

Pemegang saham, disamping nasabah, adalah pertimbangan dan perhatian utama Bank dalam operasionalnya. Bank mengandalkan usaha bersama antara seluruh karyawan dan manajemen untuk selalu memberikan tingkat layanan yang unggul secara konsisten kepada nasabah, dengan demikian memungkinkan pertumbuhan bisnis yang baik dan menguntungkan untuk memberikan keuntungan finansial yang tinggi secara konsisten kepada para pemegang saham.

Employees are one of the most important assets of the Bank in providing products and delivering services to customers; therefore the Bank is committed to develop employees to achieve their best. The rights and obligations of employees have been defined in the Company Regulations and included in the employment letter. Bank assures that those rights and obligations can be realized proportionally and professionally.

Shareholders, in addition to customers, are Bank's focal point. The Bank relies on the cooperation between all employees and management to always deliver the best services to customers, to have good and profitable business growth as well as providing continuous financial profit to all shareholders.

VII. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK

Bank melakukan *self assessment* atas pelaksanaan *good corporate governance* berdasarkan Lampiran 3 SE BI No. 9/12/DPNP tertanggal 30 Mei 2007 tentang Kertas Kerja *Self Assessment GCG* dengan rincian hasil sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

VII. SELF ASSESSMENT RESULT ON THE BANK'S GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Bank conducted self assessment towards its good corporate governance implementation based on Appendix 3 SE BI No. 9/12/DPNP dated 30 May 2007 concerning Self Assessment Worksheet of GCG Implementation with detailed result is presented in the below table:

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT / SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE Per 31 Desember 2012

NO	ASPEK YANG DINILAI/ ASPECTS EVALUATED	BOBOT/ WEIGHT (a)	PERINGKAT/ RANK (b)	NILAI/ SCORE (a) x (b)	CATATAN/ NOTES
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners	10.00%	1.00	0.100	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors	20.00%	1.00	0.200	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Completeness and implementation of the Committee	10.00%	2.00	0.200	
4	Penanganan Benturan Kepentingan Handling of conflict of interest	10.00%	1.00	0.100	Terdapat beberapa pelanggaran yang tidak material. There are several immaterial violations.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Implementation of the compliance function	5.00%	1.00	0.050	

NO	ASPEK YANG DINILAI/ ASPECTS EVALUATED	BOBOT/ WEIGHT (a)	PERINGKAT/ RANK (b)	NILAI/ SCORE (a) x (b)	CATATAN/ NOTES
6	Penerapan Fungsi Audit Intern Implementation of the internal audit function	5.00%	2.00	0.100	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern Implementation of the external audit function	5.00%	1.00	0.050	
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Implementation of risk management including internal control system	7.50%	2.00	0.150	
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) Dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>) Allocation of funds to related parties and large exposures	7.50%	3.00	0.225	Diversifikasi penyediaan dana masih terkonsentrasi pada beberapa debitur tertentu. Diversification of lending is still focused on several certain debtors.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal Transparency of financial conditions and non financial conditions of the Bank, Good Corporate Governance implementation report and internal reporting	15.00%	1.00	0.150	
11	Rencana Strategis Bank Bank's strategic plan	5.00%	1.00	0.050	Masih terdapat deviasi antara rencana bisnis bank dengan realisasinya, sehubungan dengan kondisi perekonomian global. There are still several deviations between the Bank's business plan with its realization, regarding the global economic condition.
	Nilai Komposit Composite Score	100.00%		1.375	Sangat Baik Excellent

Mengacu pada penilaian komposit tersebut, Bank menilai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas Bank berada pada peringkat 1 (satu), yaitu sangat baik. Penilaian ini ditentukan dengan memperhatikan fakta-fakta bahwa Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mengimplementasikan prinsip GCG, sekaligus mengakomodasi praktik-praktik yang mempromosikan penerapan fungsi manajemen risiko, dukungan atas kegiatan pengendalian internal, serta sistem pemantauan yang dilakukan oleh SKAI.

Walaupun begitu, Bank menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang masih harus mendapatkan perhatian dan perbaikan dari keseluruhan praktik GCG yang telah diimplementasikan oleh Bank.

Hal-hal tersebut antara lain adalah penyediaan dana kepada pihak terkait atau konsentrasi penyediaan dana kepada debitur besar dengan deviasi yang minimum.

Referring to the composite self assessment results, the Bank achieved a rating of 1 (one), which is very good. The result of this assessment has considered the evidence that the Bank has an adequate organization structure to implement GCG principles, and accommodate any practices that promote implementation of the risk management function, support for internal control activity, and also monitoring system done by Internal Audit Unit.

Nevertheless, Bank's management realized that there is still room for improvement in the Bank's GCG practices and Bank will strive to continuously improve.

Area for improvement includes lending to top debtors with minimum deviation.

VIII. PENUTUP

Sejauh ini, Bank telah meletakkan dasar yang kokoh untuk pelaksanaan GCG, dengan memenuhi semua ketentuan yang digariskan oleh Bank Indonesia, yang turut dibuktikan dengan keberadaan hasil *self-assessment* atas pelaksanaan GCG yang cukup memuaskan. Kedua hal tersebut menunjukkan komitmen Bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan ketentuan GCG.

Bank menyadari bahwa pelaksanaan GCG tidak hanya untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia, namun lebih dari itu juga untuk menunjang operasional Bank dalam mencapai tujuan bisnisnya untuk menghasilkan yang terbaik bagi nasabah, karyawan, regulator, masyarakat dimana Bank beroperasi dan pemegang saham.

Untuk selanjutnya, Bank akan terus meningkatkan pelaksanaan GCG yang telah berjalan selama ini dengan fokus pada peningkatan keterlibatan anggota Dewan Komisaris dan anggota-anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, peningkatan tingkat pengawasan Direksi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Manajemen Risiko, serta pengendalian internal.

Dengan hormat,



Enrique V Bernardo
Presiden Komisaris/President Commissioner

VIII. CONCLUSION

So far, Bank has placed a strong foundation to implement GCG, by fulfilling all regulations defined by Bank Indonesia, evidenced by the existence of self-assessment results that is on target and satisfactory. That has shown the commitment of the Bank in implementing all principles and stipulations of GCG.

Bank realizes that GCG implementation is not only to fulfill Bank Indonesia regulations, but also to support operations in reaching business goals to obtain best results for all customers, employees, regulators, and the community where the Bank operates and also shareholders.

Furthermore, the Bank will endeavor to improve the implementation of GCG which has been operated by focusing on leveraging the involvement of members of the Board of Commissioners and Committee members and optimizing the supervision done by the Board of Directors through Compliance, Internal Audit, Risk Management, and also internal control functions.

Respectfully



Joseph Abraham
Presiden Direktur/President Director